KONSEP DEMOKRASI
DALAM PERSPEKTIF ABDURRAHMAN WAHID

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Ushuluddin

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS. K 4-2010 014 AF
NO. REG : 4-2010/AF/014
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

TAUFIQ HIDAYAT
E01205016

FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Taufiq Hidayat** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Juni 2010

Pembimbing,

DR.H. MA'SHUM,M.Ag

NIP : 196009141989031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini yang disusun oleh **Taufiq Hidayat** ini telah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi,.Surabaya, 4 Agustus 2010.

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan;

DR.H. Ma'shum,M.Ag
NIP : 196009141989031001

Ketua,

DR.H. Ma'shum,M.Ag
NIP : 196009141989031001

Sekretaris,

Ghozi. Lc, M. Fil. I
NIP. 197710192009011008

Penguji I,

Prof. Dr. HM. Djamaluddin Miri, M. Ag
NIP. 197510162002121001

Penguji II

Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil. I
NIP. 195212311987031011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini yang berjudul : **"KONSEP DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF ABDURRAHMAN WAHID".** Adapun dalam penyusunan skripsi ini terdapat satu rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep demokrasi menurut Abdurrahman Wahid. Bagaimana pandangan Abdurrahman Wahid mengenai konsep demokrasi ini apakah condong ke konsep yang diterapkan di barat ataukah konsep yang diterapkan di timur.

Pilar-pilar demokrai dalam pandangan Abdurrahman Wahid sendiri tidak lepas dari penegakan nilai-nilai HAM, keadilan, egaliter (persamaan), dan kebebasan individu dalam persoalan berfikir dan berpendapat. Itu merupakan aspek yang terpenting dalam teraplikasikannya prinsip-prinsip demokrasi dan juga penguatan civil society. sedangkan menurut penulis sendiri yakni terbentuknya sebuah Negara ideal, untuk membentuk Negara ideal kita harus menciptakan dulu sebuah tatanan masayrakat ideal, dan masayrakat ideal akan tercipta jika pondasi dalam membentuk masayarakat ideal itu terbangun kokoh. Pondasi itu ialah pendidikan agama yang merupakan pembentuk manusia menjadi manusia yang bijaksana dan berbudi luhur. Tidak hanya sebatas penguatan penegakkan nilai-nilai HAM, egaliter, keadilan, dan kebebasan individu dan penguatan *civil society.*

Dan Pembahasan mengenai demokrasi sendiri merupakan pembahasan yang menarik untuk dibahas dan tidak ada habisnya. Pemahaman akan demokrasi akan selalu berkembang mengikuti zaman, pemahaman mengenai demokrasi tidak stagnan dan akan selalu berproses. Seperti halnya Abdurrahman Wahid yang berpendapat bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang akan terus berjalan. Pemikiran-pemikiran yang kontroversial dari Abdurrahman wahid merupakan sebuah proses pendewasaan masyarakat agar dalam penerapan system demokrasi pada nantnya dapat menerima keberbedaan tersebut.

Upaya penulis dalam pengerjaan skripsi ini yaitu, Penelitian ini mengkaji pemikiran demokrasi menurut Abdurrahman Wahid. Hal ini berangkat dari pemikiran Abdurrahman Wahid yang masih bersifat kasuistik. Dan penulis akan menganalisis pemikiran demokrasi menurut Abdurrahman Wahid dengan dan dalam menganalisis pemikiran Abdurrahman Wahid sendiri penulis menggunakan analisis idelaisme realisticnya Plato.

Dalam pengumpulan data ini, terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer yakni buku-buku yang menerangkan tentang demokrasi menurut Abdurrahman Wahid dan data sekunder yakni buku-buku yang menerangkan tentang demokrasi dan buku tokoh Plato sebagai bahan analisis. Jenis penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan agar dapat mengetahui dan memahami kebenarannya yaitu; *interpretasi, koherensi intern, deskriptif idealism realistic,* kemudian dilanjutkan dengan *content analisis.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAKSI vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Masalah 8

E. Alasan Memilih Judul 8

F. Penegasan Istilah 9

G. Kajian Pustaka 10

H. Metode Penelitian 11

I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II: DEMOKRASI, PERTUMBUHAN DAN MACAM-MACAMNYA

A. Definisi Demokrasi 17

B. Sejarah Perkembangan Demokrasi

1. Fase Klasik (Demokrasi Athena) 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fase Pencerahan 27
3. Fase Modern 31
4. Fase Kontemporer 33
C. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia
1. Kurun Waktu 1945-1949 36
2. Kurun Waktu 1949-1950 36
3. Kurun Waktu 1950-1959 36
4. Kurun Waktu 1959-1965 37
5. Kurun Waktu 1965-1998 37
6. Kurun Waktu 1998- sekarang (Orde reformasi) 38
D. Macam-Macam Demokrasi
1. Demokrasi Liberal 43
2. Demokrasi Komunis 44

BAB III: DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF ABDURRAHMAN WAHID

A. Biografi Abdurrahman Wahid
1. Riwayat Kehidupan 48
2. Perjalanan Pendidikan 52
3. Perjalanan Karir 57
4. Penghargaan dan karya-karyanya 60
5. Pengaruh 63
B. Paradigma Pemikiran 65
C. Pribumisasi Islam
1. Menimbang Pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid 71
2. Akar Pribumisasi 75
3. Peng-Islaman Tanpa menjadi Arab 80
D. Agama dan Demokrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Korelasi antara Islam dan demokrasi 83
2. Sebuah Proses Demokrasi 91
3. Liberalisme di mata Abdurrahman Wahid 97

E. Demokrasi, Negara dan Masyarakat ideal
1. Penegakan nilai-nilai HAM, keadilan, egaliter (persamaan), dan Kebebasan 103
2. Aspek-Aspek Penentu Terealisasinya prinsip demokrasi 110

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan 119
B. Saran-saran 120

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir milenium kedua ditandai dengan perubahan besar di Indonesia. Rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun yang dipimpin oleh Soeharto akhirnya tumbang. Demokrasi Pancasila versi Orde Baru mulai digantikan dengan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Hanya saja tidak mudah mewujudkan hal ini, karena setelah Soeharto tumbang tidak ada kekuatan yang mampu mengarahkan perubahan secara damai, bertahap dan progresif. Yang ada justru muncul berbagai konflik serta terjadi perubahan genetika sosial masyarakat Indonesia.

Menguatnya tuntutan demokratisasi di Indonesia ini lantaran demokrasi dipandang sebagai sistem yang mampu mengantar masyarakat ke arah transformasi sosial politik yang lebih ideal, dalam hal sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. ideal di sini ialah dalam arti, manusiawi, egaliter, dan berkeadilan.[1] Demokrasi dinilai lebih mampu mengangkat harkat manusia, lebih rasional dan lebih realistis untuk mencegah munculnya suatu kekuasaan yang dominan, represif dan otoriter.[2]

---

[1] Umaruddin Masdar. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang demokrasi.* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999) Hal 2.

[2] Ma'mun Murod Al-Brebesy. *Menyingkapi pemikiran politik Gus dur & Amien Rais Tentang negara.* (Jakarta, PT Raja Grafindo, 1999) Hal 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demokrasi dipandang sebagai suatu system politik dan cara pengaturan kehidupan terbaik bagi setiap masyarakat yang menyebut diri modern. Maka tidak mengherankan apabila demokrasi menjadi salah satu ukuran terpenting di dalam tata hubungan dan pergaulan inernasional yang semakin saling tergantung dewasa ini. [3] Tetapi pengalaman di berbagai Negara menunjukkan bahwa kebebasan dan demokrasi bersifat *fragile*, rawan terhadap kemungkinan penyelewengan. Di samping selalu ada arus tuntutan kepada demokrasi dan kebebasan, selalu ada pula arus balik yang cenderung membatasinya.[4]

Dalam sejarah Indonesia merdeka, dua praktek politik yaitu demokrasi dan otoriter ini pernah sama-sama tampil dalam pentas politik nasional. Periode 1945-1959 meurpakan periode demokrasi liberal dimana ditandai dengan kehadiran banyak partai politik yang mempunyai peran penting dalam pembuatan kebijaksanaan Negara. Periode ini berakhir bersamaan dengan dikelurkannya dekrit presiden sekaligus menandai tampilnya praktek politik yang otoriter, dengan presiden sebagai pemegang sentral kekuasaan. Soekarno merupakan aktor utama dan semua partai poltik kecuali PKI {Partai Komunis Indonesia} sebagai ciri demokrasi tidak mempunyai peran yang berarti.

---

[3] Syamsuddin Haris. *Demokrasi Di Indonesia Gagasan dan pengalaman.* (Jakarta, PT Pustaka LP3ES, 1995) hal 3.

[4] Riza Noer Arfani. *Demokrasi Indonesia Kontemporer,* (Jakarta, PT Raja Grafido Persada, 1996) hal 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tumbangnya rezim orde lama kemudian diganti dengan orde baru telah membawa dampak terhadap praktek demokrasi dan otoriterisme. Praktek-praktek demokrasi mulai muncul kembali. Namun ketika logika pembangunan mengalami perubahan, dengan menitik-beratkan pada bidang ekonomi dengan berorientasi pada pertumbuhan terjadilah perubahan ke arah praktek-praktek otoriterianisme. Setidaknya ditandai dengan keberadaan Negara yang semakin kuat dan merosotnya partisipasi politik masyarakat juga semakin melemahnya peran dan fungsi lembaga legislatif, yudikatif. Lahirnya organisasi-organisasi koorporatis. Kebebasan berbicara pada masa ini dibatasi, marak terjadinya KKN (kolusi, korupsi, nepotisme) penyalahgunaan kekuasaan, dan praktek demokrasi menjadi semu.

Setelah runtuhnya orde baru dengan demokrasi pancasila versi pemerintahan tersebut dan memasuki era reformasi dengan memasuki demokrasi dalam arti yang sesungguhnya pada tahun 1998 sampai sekarang bergulir, perjalanan demokrasi di Indonesia masih tertatih-tatih. Demokrasi yang kerap diafirmasi sebagai pilihan dan sistem terbaik dalam mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat belum menampilkan diri sebagai sosok yang sanggup memulihkan dan menjaga martabat republik ini dari sejumlah krisis yang mendera. Yang ada justru muncul berbagai konflik serta terjadi perubahan genetika sosial masyarakat Indonesia. Nilai-nilai local bangsa semkin tergerus akan budaya barat dimana konsep demokrasi lahir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demokrasi yang ditahbis menjadi semacam *volonte generale* (kehendak umum) yang harus diwujudkan di republik ini telah ikut menyumbangkan ketegangan-ketegangan dan berperan serta dalam meningkatkan frekuensi kekerasan dan tindakan-tindakan anarkis di masyarakat. Atas nama demokrasi, masyarakat kita menjadi masyarakat yang tidak sabaran, sulit menerima kekalahan, mudah terpancing oleh hasutan dan terampil mengelola perbedaan menjadi pemantik untuk menebarkan kebencian dan teror.

Cornelis Lay (seorang pakar politik UGM) menyebutkan bahwa permasalahan demokrasi yang ada di Indonesia saat ini jangan-jangan permasalahan demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini hanya karena kita menamai gerakannya sebagai gerakan demokrasi. Karena menamainya demokrasilah akhirnya terjadi kebingunangan bentuk dari demokrasi itu sendiri.[5]

Dengan demikian, demokrasi pada dasarnya memerlukan aturan main.Aturan main tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama dan sekaligus yang terdapat dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Di masa transisi, sebagian besar orang hanya tahu mereka bebas berbicara, beraspirasi, berdemonstrasi. Namun aspirasi yang tidak sampai akan menimbulkan kerusakan. Tidak sedikit fakta yang memperlihatkan adanya pengrusakan ketika terjadinya demonstrasi menyampaikan pendapat. Untuk itu orang memerlukan pemahaman yang utuh agar mereka bisa menikmati demokrasi.

---

[5] http://halilintarblog.blogspot.com/2008/12/empat-masalah-demokratisasi-di.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harapan dari adanya demokrasi yang mulai tumbuh adalah ia memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan juga bangsa. Disamping itu demokrasi diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Tidak hanya itu, demokrasi diharapkan mampu menjadikan negara kuat. Demokrasi di negara yang tidak kuat akan mengalami masa transisi yang panjang. Dan ini sangat merugikan bangsa dan negara.

Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia belum memikirkan kaum lemah dan hanya memikirkan mereka yang kuat di kancah perpolitikan Indonesia. Bagi kaum lemah, demokrasi belum memberikan dampak yang positif buat mereka. Baik dari segi ekonomi persamaan dalam hukum bahkan dalam hal perpolitikan. Bahkan dalam hal kekuasaan seolah-olah rakyat hanya dijadikan alat untuk memperoleh suara dan mereka (para orang-orang kapitalis) dapat menduduki kekuasaan. Inilah yang menjadi tantangan pemerintahan Indonesia yakni bagaimana meratakan demokrasi di Indonesia. Ini dapat dilakukan dari pejabat-pejabat yang bersifat egois dengan mencuri uang negara untuk kaum lemah. Oleh sebab itu, segenap rakyat Indonesia harusnya memberikan aspirasi dan kritikan terhadap jalannya pemerintahan. Jika rakyat sudah mulai memberikan aspirasi dan kritikan, sebaiknya pemerintah memberikan informasi bagaimana memberikan suatu aspirasi dan kritikan dengan baik, agar tidak ada lagi demonstrasi yang anarkis. Demokrasi diharapkan mampu menjadikan negara kuat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu sebab Kenapa anarki itu terjadi adalah karena demokrasi kita identik dengan kehendak untuk benar. Kebebasan kita sudah tidak terkendali bahkan menjurus ke arah anarki. Kebebasan yang berlebih-lebihan seperti itulah yang membawa bencana bagi negara dan wargannya karena kebebasan yang demikian itu yang akan melahirkan anarki dan dari anarkilah tirani tercipta. Kebebasan kita kebebasan yang *keblablasan* atau kebebasan yang tak beradab yang oleh Plato disebut sebagai *kebebasan ekstirm.*[6] Demokrasi hanya sebagai alat bagi orang-orang kapitalis untuk duduk dalam jabatan penting dan mengambil keuntungan dari jabatan tersebut dengan hanya memanfaatkan masyarakat untuk memilih dia dengan cara *money politic,* yakni membeli suara rakyat untuk memilih dia agar mereka orang-orang kapitalis tersebut mendapat kekuasaan dalam pemerintahan.

Salah satu pemikir Indonesia yang mempunyai pengaruh besar dalam permasalahan keagamaan dan kebangsaan ialah Abdurrahman Wahid. Ia mampu mengaplikasikan kearifan nilai-nilai agama secara kontekstual. andil besar Gus dur dalam pemikiran demokrasinya sangat brilian, dengan dimana proses demokrasi tidak hanya sebatas pada lingkup pemerintahan, tetapi juga pada lingkup kehidupan masyarakat sehari-hari. Proses demokrasi menurut dia harus tercermin dalam interaksi antar kelompok dan golongan masyarakat, dalam kehidupan keluarga, bahkan hubungan antar individu harus didasarkan pada nilai-nilai demokrasi. Gus dur mencoba membangun pemahaman akan nilai-nilai demokrasi dimulai dari bawah, apabila pada tataran individu, sturktur

[6] DR.J.Rapar, Th.D.,ph.d. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta, CV Rajawali, 1986. Hal 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat sudah dapat mengaplikasikan akan nilai-nilai demokrasi ini akan menentukan esensi dan kualitas demokrasi di atasnya yakni Negara. Itulah salah satu solusi Abdurrahman Wahid yang menarik, dia tidak membangun dari atas akan tetapi dia membangun dari kalangan masyarakat bawah akan pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi. Dan dia berhasil, mensinergikan antara nilai-nilai agama dengan nilai demokrasi. Itualah salah satu kehebatan Abdurrahman Wahid. Ia sering melontarkan pemikiran-pemikiran yang dianggap controversial oleh orang lain, padahal secara tidak kita sadari dia telah mengajari kita untuk berdemokrasi, bagaimana kita menenrima keberbedaan pendapat tersebut dengan arif dan diselesaikan dengan cara musyawarah.

Keunikan dan keoriginalan pemikiran Abdurrahman Wahid dalam mensinergikan antara Islam dan isu-isu politik kebangsaan, misalnya demokrasi, sehingga mendorong penulis mengangkat permasalahan ini. Salah satu tokoh intelektual Muslim Indonesia yang secara tegas menerima demokrasi sebagai preferensi final bagi sebuah sistem politik atau kenegaraan. Preferensi ini didasarkan pada satu asumsi bahwa demokrasi merupakan sistem paling rasional dan efektif yang memungkinkan terbentuknya suatu tata sosial dan politik yang adil, egaliter, dan manusiawi sebagaimana yang dicita-citakan Islam.

Oleh sebab itu penulis di sini mengidentifikasikan suatu persoalan yaitu mengenai "*Demokrasi dalam perspektif Abdurrahman Wahid*". Penelitian skripsi ini hanya akan dikhususkan pada studi analisis tentang pemikiran demokrasi menurut Abdurrahman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahid, dan tidak menutup kemungkinan penulis juga akan mengkritik terhadap pemikirannya, dengan landasan pemikiran peneliti di sini dalam menganalisis dan mengkritik terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid dengan menggunakan landasan idealisme realistiknya Plato.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Pembahasan dalam penulisan ini difokuskan kepada permasalahan demokrasi politik, yakni mengenai kenegaraan. Seperti permasalahan tentang keadilan, kekuasaan, kebebasan individu, egaliter yang masih menjadi problema di Indonesia saat ini. dimana hal-hal tersebut merupakan prinsip-prinsip dari demokrasi, prinsip-prinsip yang belum terlealisasi secara menyeluruh dan nyata. Sehingga demokrasi masih belum berjalan secara semestinya.

C. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas arah dari permasalahan tersebut, maka perlu dirumuskan sebagai beriktut :

Bagaimana konsep demokrasi menurut Abdurahman Wahid ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, dimaksudkan untuk:

Ingin menganalisis konsep demokrasi menurut Abdurrahman Wahid

E. Alasan Memilih Judul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demokrasi di Indonesia saat ini merupakan masalah yang Urgen. Penerapan demokrasi yang masih rancu mengakibatkan prinsip-prinsip dari demokrasi masih belum berjalan secara semestinya, dan Abdurrahman wahid mempunyai solusi-solusi yang jenius dalam pemikiran mengenai demokrasi dalam memecahkan masalah demokrasi. permasalahan-permasalahan yang muncul ialah:

1. Konsep demokrasi yang diharapkan menjadi system politik dan pemerintah yang paling baik.
2. Penerapan system demokrasi di Indonesia yang masih rancu
3. Kekurang jelasan Abdurrahman Wahid dalam pengungkapan pemikirannya,
4. Konsep demokrasi menurut Abdurrahman Wahid yang masih menjadi wacana saja dan belum di direalisasikan baik di masyarakat dan pemerintah.

Hal ini menjadi pendorong bagi penulis untuk mengangkat kembali karya-karya Abdurrrahman Wahid, khususnya mengenai konsep demokrasi, yang merupakan salah satu tokoh yang dengan tegas mengharuskan Negara Indonesia ini menggunakan system demokrasi. Bagaimana menurut Abdurrahman Wahid konsep demokrasi yang ideal sesuai dengan kultur Indonesia. Hal ini Agar tidak terjadi kerancuan di masyarakat umum tentang pemaknaan demokrasi dan kelemahan-kelemahan konsep demokrasi yang diimplementasikan di Indonesia saat ini.

F. Penegasan Istilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa variable dalam judul di maksud tersebut, dapat dipahami nelalui beberapa penjelasan saebagai berikut:

Demokrasi Suatu system pemerintahan yang berasaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga rakyat mempnyai peranan penting dalam system pemerintahan ini. system yang menjunjung tinggi nilai egaliter, kebebasan individu, menjunjung tinggi HAM, dan berkeadilan.

Abdurrahman Wahid Lahir 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur, dengan nama Abdurrahman ad-Dakhil. Salah satu tokoh neo-modernisme Islam Indonesia yang mempunyai pengaruh besar baik di kalangan umat Islam Khususnya NU maupun agama lainnya.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka disini mempunyai tujuan untuk dapat mengetahui keoriginalitasan suatu karya dalam penelitian. Peneliti-peneliti yang terdahulu menjadi suatu pijakan bagi penulis untuk berfikir dan bersikap berbeda. Suatu perbedaan yang harus dicari solusinya dan menjadi suatu bentuk yang harus dikonkritkan dalam tulisan.

Abdurrahman Wahid dalam bukunya *Membangun Demokrasi*, yang diterbitkan oleh PT Remaja Rosdakarya di Bandung pada tahun 1999. Dalam buku ini membahas mengenai cukilan-cukilan gagasan gus dur atau pandangan-pandangan gus dur mengenai Demokrasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kumpulan Kolom Dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser yang diterbitkan oleh LKiS di Yogyakarta pada tahun 2002. Pada buku ini merupakan kumpulan dari gagasan-gagasan Gus Dur mengenai permasalahan politik selama dia turun dari tahta kepresidenan.

Tuhan Tidak Perlu Dibela, terbitan LKiS Yogyakarta tahun 1999. Buku ini berisi kumpulan-kumpulan gagasan Abdurrahman Wahid yang pernah digoreskan di masa lamapu yang jenius, buku ini berisi kumpulan kolom-kolomnya di majalah Tempo pada tahun 1970-an dan 1980-an. Yang diantaranya kolom-kolom tersebut menulis mengenai demokrasi, ideology, dan politik.

Ma'mun Murod Al-Brebesy dalam bukunya *menyingkapi pemikiran politik Gus Dur & Amien Rais tentang Negara* yang diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada di Jakarta pada tahun 1999. Dalam buku ini membahas aspek-aspek demokrasi dari banyak sudut pandang tokoh, misalnya Amien Rais dan Abdurraman Wahid. di dalam buku ini juga diulas tentang biografi Abdurrahman Wahid, dan juga pandangan-pandangan Abdurrahman Wahid mengenai pemikiran politiknya yang meliputi aspek ideology dan Negara dan aspek demokrasi dan civil society.

Umaruddin Masdar, yang menulis buku tentang "*membaca pemikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang demokrasi*" yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar pada tahun 1999. Di dalam buku ini diungkapkan keterkaitan antara Islam dan Demokrasi dalam pandangan Abdurrahman Wahid, pandangan awal agar umat Islam mau menerima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep Demokrasi yang dianggap tabu oleh umat Islam dan karena tuntutan demokratisasi di Negara-negara Islam. Hal-hal tersebut membuat Abdurrahman wahid secara tegas menerima konsep demokrasi sebagai preferensi final bagi sebuah system politik atau kenegaraan.

Riza Noer Arfani menulis "*Demokrasi Indonesia kontemporer*" yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada tahun 1996 membahas tentang agama dan demokratisasi di Indonesia. Dalam buku ini juga mengulas tentang upaya penciptaan demokrasi sebagai lembaga-lembaga yang beroperasi dengan prinsip-prinsip demokrasi, kemudian lembaga-lembaga yang menciptakan dan melanggengkan cirri-ciri demokratis suatu masyarakat. Buku ini juga mencoba merefleksikan kembali kehidupan demokrasi kontemporer di Indonesia.

Wasid dalam bukunya yang berjudul "*Gus Dur sang guru" bangsa* yang diterbitkan oleh Interpena Yogyakarta 2010. Di dalam buku ini membahas tentang pergolakan agama dan negara, relevansi nilai Islam dengan demokrasi, dan permasalahan-permasalahan mengenai Islam dan kebangsaan.

Dari sekian bahasan dari buku yang penulis dapatkan, penulis masih belum menemukan suatu gagasan penciptaan suatu tatanan masyarakat ideal dalam pemikiran Abdurrahman Wahid sebagai pondasi terleaisasinya prinsip-prinsip demokrasi di kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan bernegara.

H. Metode Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian akan dilaksanakan melalui pendekatan dengan metode:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini ialah Kualitatif dan dilakukan tahapan-tahapan guna mengetahui dan memahami kebenarannya; *pertama;* melalui *interpretasi*, yaitu data disini dikumpulkan dari keterangan naskah, referensi, fakta atau peristiwa sejrah ditangkap nilai, arti dan maksudnnya melalui eksplorasi kepustakaan. *Kedua :* koherensi intern, yitu usaha untuk memahami secara benar guna memperoleh hakikat dengan menunjukkan semua unsur structural dilihat dalam satu struktur yang konsisten.

Ketiga; deskripsi idealisme realistic, deskripsi sendiri yaitu penelitian filsafat yang berusaha untuk memahami kenyataan secara lebih mendalam, karena yang tersembunyi dalam kenyataan adalah *a possible world* atau dapat juga disebut *a potential made of human existence.*[7] Sedangkan *idealisme realistis,* Idealisme sendiri ialah suatu teori yang mengatakan bahwa realitas itu terdiri atas ide, pikiran, akal, atau jiwa dan bukan materi. Menurut Plato sendiri ide merupakan suatu realitas yang objektif oleh sebab itu idealism Plato sering disebut *idealisme realistis.*[8]

2. Pengumpulan data dan sumber kajian

---

[7] Drs. Sudarto. *Metodologi penelitian filsafat*. Jakarta, PT Raja Grafingo Persada, 1997. Hal 42.
[8] DR.J.H. Rapar, Th.D., Ph.D. *Filsafat Politik Plato* Jakarta, CV Rajawali, 1986. Hal 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran penelitian yang objjek atau sasaran tersebut umumnya eksis dalam jumlah yang besar atau banyak.[9] Dan sasaran dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini didapatkan dari keterangan naskah, referensi, fakta atau peristiwa sejarah ditangkap nilai, maksudnya melalui eksplorasi kepustakaan.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber, baik data referensial maupun data sejarah arkeologis. Pengalian data di sini terdiri dari data primer yang meliputi segala realitas (teks) yang mengungkapkan pemikiran politik Abdurrahman Wahid khususnya mengenai pemikiran demokrasi, yaitu *membangun demokrasi* karya Abdurrahman Wahid. Kemudian ada juga buku lain ciptaan Abdurrahman Wahid yang berjudul *kumpulan kolom dan artikel Abdurrahman Wahid selama era lengser* dan juga ada buku lain karya Abdurrahman Wahid yaitu *Tuhan tidak perlu dibela.*

Sedangkan untuk data sekundernya meliputi data yang ditulis oleh beberapa orang tentang beberapa hal yang terkait penelitian ini. seperti karya Umaruddin Madar yang berjudul membaca *Pemikiran Gus Dur Dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, kemudian karya Ma'mun Murod Al-Brebesy yaitu *Menyingkapi Pemikiran Politik Gus Dur Dan Amien Rais Tentang Negara*, lalu karya dari Syamsuddin Haris dalam bukunya yaitu *demokrasi di Indonesia gagasan dan pengalaman*. Dan juga karya dari Riza Noer Arfani dalam bukunya yaitu *Demokrasi*

---

[9] Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif (aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer). Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001. Hal 43.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL

Indonesia Kontemporer. Lalau karya dari Zainal Abidin dalam bukunya yaitu Filsafat manusia (*Memahami manusia melalui filsafat*) yang dalam buku ini membicarakan tentang kritik tentang konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Nietzsche.

3. Analisis data

Dalam sebuah penulisan skripsi yang sumber-sumbernya berdasarkan studi pustaka atau *library reseaach* ini, menggunakan pendekatan *idealism realistic.* Jadi data yang telah dikumpulkan dari hasil pengumpulan data tersebut, kemudian diidentifikasi dengan *Content Analysis* atau materi. Selanjutnya hasil dari interpretasi tersebut di petakan dalam sistematika diskriptif *idealisme realistic. Idealisme Realistic* disini mempunyai pengertian bahwa dunia ide itu merupakan suatut realitas yang obyektif.

I. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan masalah yang dibahas, keseluruhan kajian ini terdiri dari empat bab, yaitu;

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, penegasan-penegasan istilah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Demokrasi dan Biografi Abdurrahman Wahid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bab ini dibagi lima sub bab, pertama yakni membahas mengenai definisi demokrasi. kemudian sub bab kedua yaitu perkembanggan demokrasi. ketiga yakni mengenai sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Kemudian sub bab keempat yakni jenis-jenis demokrasi. Dan yang terakhir sub bab kelima membahas mengenai biografi Abdurrahman Wahid, yang akan mengemukakan riwayat hidup Abdurrahman wahid, karya pemkirannya dan penghargaan yang diperolehnya, dan juga pengaruhnya.

Bab III: konsep demokrasi dalam perspektif Abdurrahman Wahid

Dalam bab ini akan dibagi empat sub bab yang pertama yakni mengenai paradigma pemikirannya kemudian sub bab kedua yakni mengenai pribumisasi Islam.

Sub bab ketiga yakni mengenai agama dan demokrasi. Kemudian sub bab keempat dan yang terakhir yakni demokrasi, Negara dan masyarakat ideal.

Bab IV: Penutup

Bab ini merupakan ringkasan dari keseluruhan kajian analisis data yang telah dipaparkan, yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

DEMOKRASI,

PERTUMBUHAN DAN MACAM-MACAMNYA

A. Definisi Demokrasi

Kata demokrasi mempunyai banyak varian makna yang cukup beragam. Namun, dalam dunia modern pengertian demokrasi lebih ditekankan pada makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam urusan-urusan politik ada di tangan rakyat.[1] Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Dalam arti harifiahnya, demokrasi berasal dari bahaya Yunani yakni *demos* yang berarti rakyat dan *kratia* yang artinya pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut. Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut

[1] Umaruddin Masdar. *Membaca pemikiran Gusdur dan Amien Rais Tentang Negara.* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak Negara.[2]

Sebagaimana diungkapkan Giddens bahwa demokrasi pada dasarnya mengandung makna suatu system politik di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi.[3] Memang kata demokrasi mempunyai varian makna yang cukup beragam. Namun dalam dunia modern, pengertian demokrasi lebih ditekankan pada makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam urusan-urrusan politik ada di tangan rakyat. Oleh sebab itu demokrasi juga sering dikatakan sebagai "*rule by the people*", yakni system pemerintahan atau kekuasaan oleh rakyat, baik yang bersifat langsung maupun demokrasi dengan system perwakilan.

Secara etimologis, demokrasi dapat dimengerti sebagai suatu sistem politik dimana semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang secara efektif menawarkan peluang pada masyarakat untuk mengganti elite yang memerintah. Ini setidaknya menurut Ulf Sundhaussen[4]. Demokrasi juga bisa dipahami sebagai suatu "polity" (pemerintah) dimana semua warga negara menikmati kebebasan untuk berbicara, kebebasan berserikat, mempunyai hak yang sama di depan hukum, dan kebebasan untuk menjalankan agama yang dipeluknya

---

[2] http://zanikhan.multiply.com/journal.

[3] Abdul Ghofur, *Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta, Walisongo Press dan Pustaka Pleajar, 2002), 15.

[4] Ma'mun Murod Al-Brebesy. *Menyingkapi pemikiran politik Gus dur & Amien Rais Tentang negara*. (Jakarta, PT Raja Grafindo, 1999) 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hampir semua teoritis sejak zaman klasik selalu menekankan bahwa sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi adalah rakyat. Oleh karena itu selalu ditekankan peranan rakyat yang senyata-nyatanya dalam proses politik yang berjalan. Akan tetapi kecenderungan umum teorisasi demokrasi sejak 1970-an adalah kemerosotan pengaruh pemikiran tentang demokrasi yang substantif. Teorisasi masa kini lebih menekankan persoalan penciptaan prosedur. Tumpuannya adalah gagasan yang dilontarkan Joseph Schumpeter, yaitu demokrasi sebagai metode politik. Definisi yang rasional, utopian dan ideal, yang mewarnai konseptualisasi pada masa sebelumnya, kehilangan banyak pengaruh. Definisi Schumpeterian yang lebih bersifat empiric, deskriptif, institusional dan procedural inilah yang mendominasi teoritisasi mengenai demokrasi sejak 1970-an.

Tokoh lain yang mempunyai pandangan selaras adalah Robert A. Dahl. Sebagai ilmuwan politik terkemuka di Amerika Serikat, Robert Dahl sangat meyakini bahwa sistem demokrasi lebih unggul bila dibandingkan dengan sistem politik lainnya. Keungulan sistem demokrasi yakni ialah proses demokrasi lebih mampu meningkatkan kebebasan yang dimiliki warga negara jika dibandingkan dengan yang lain, selanjutnya proses demokrasi dapat meningkatkan pengembangan masyarakat, dan proses demokrasi merupakan cara yang paling pasti, meskipun bukan yang paling sempurna, yang dapat digunakan manusia untuk melindungi dan memajukan kepentingan dan kebaikan yang sama-sama mereka miliki dengan orang-orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Alfian mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah system politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan consensus. Akan tetapi demokrasi mensyaratkan bahwa segenap konflik itu berada dalam tingkatan yang tidak menghancurkan system politik. System politik itu sendiri disebut demokrasi jika ia berkemampuan membangun mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik menjadi konsensus.[5]

Selanjutnya Ulf Sundhaussen mensyaratkan demokrasi sebagai suatu system politik yang menjalankan tiga criteria: 1) dijaminya hak semua warga Negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang diadakan secara berkala dan bebas,; 2) semua warga Negara menikmati kebebasan berbicara, beroragnisasi, dan memperoleh informasi dan beragama; serta 3) dijaminya hak yang sama di depan hukum.

Demokrasi juga sering dimengerti sebagai pengakuan bahwa kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Disini demokrasi sebagaimana Abraham Lincoln mengandung maksud "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Demokrasi juga berarti mentolelir adanya perbedaan pendapat atau dalam pengertian tertentu disebut dengan konflik, dalam hal ini bukan konflik yang dapat merusak sistem politik yang sedang berlangsung.

Sementara Yusril Ihza Mahendra mencoba menyoroti demokrasi dari sudut pandang yaitu pertama, demokrasi sebagai suatu ideologi, biasanya akan sangat sulit dicari kesepahaman di antara individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan. Kedua,

[5] *Ibid.*, Hal 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokrasi dilihat sebagai suatu mekanisme atau proses dan tata cara dalam pengambilan suatu keputusan.

Dalam filsafat politik kontemporer, yang mengkaji politik secara yuridis-formal, merumuskan demokrasi dari sudut pandang sumber kewenangan untuk memerintah. Salah satu tokohnya ialah John Locke. Asumsi dasar yang dipakai ialah bahwa manusia merupakan makhluk individu yang memiliki hak dan kebebasan yang setara. Sementara paradigma positifistik memandang demoikrasi dari segi proses, sehingga keberadaannya dapat diobesrvasi dan diukur. Konsep demokrasi ini diperkenalkan J.Schumpeter, yang merumuskan demokrasi sebagai kompetisi yang fair di antara kandidat untuk meyakinkan warga negara yang berhak memilih untuk memilih mereka yang menduduki jabatan puncak di pemerintahan.

Pandangan senada yang menyatakan bahwa demokrasi dipandang sebagai proses dating dari Nurcholish Madjid. Hanya saja Nurcholish Madjid melihatnya dalam konteks keindonesiaan. Dalam hal ini Nurcholish Madjid menawarkan prinsip-prinsip demokrasi yang mendesak untuk bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dan ini menurutnya merupakan konsekuensi dari demokrasi sebagai sebuah proses yang mesti harus terwujud dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangakn Fahmi Huwaydi, mencoba melihat demokrasi dari sisi substansinya. Menurut Huwaydi, esensi dari demokrasi menghendaki masyarakat untuk memilih seorang pemimpin yang akan memimpin mereka, serta mengatur urusan mereka, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menghendaki mereka memilih seorang pemimpin atau system yang mereka tidak sukai.

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas yang pro terhadap demokrasi, Nietzsche berpendapat demokrasi adalah penyimpangan. Demokrasi adalah izin yang diberikan pada setiap bagian dari organisme untuk melakukan apa saja yang disukainya. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang tanpa karakter.[6] Sedangkan bagi Plato sendiri sistem demokrasi merupakan sistem yang tidak praktis, sistem yang dimana banyak kelemahan-kelemahan yang jika tidak dapat mengarahkan akan membawa bangsa ke arah kehancuran. Seperti yang terjadi di Athena di eranya Plato, dimana sistem yang terlalu mendewa-dewakan kebebasan individula yang berlebih-lebihan atau kebebasan yang tak beradab, atau biasa disebut Plato dengan *kebebasan ekstrim.*

Definisi-definisi ini mengimplikasikan bahwa demokrasi mengandung unsur-unsur kekuasaan mayoritas, pemilihan yang bebas dan bertanggung jawab. Hal ini berarti bahwa dalam penggunaan kontemporer, demokrasi didefinisikan lebih pragmatis ketimbang filosofis. Sekarang ini istilah demokrasi bagi banyak orang dianggap sebagai kata yang mengimplikasikan nilai-nilai perjuangan untuk kebebasan dan jalan hidup yang lebih baik. Demokrasi bukan hanya merupakan metode kekuasaan mayoritas melalui parrtisipasi rakyat dan kompetisi yang bebas, tetapi juga mengandung nilai-nilai

---

[6] Zainal Abidin. *Filsafat Manusia (memahami manusia melalui filsafat)* Bandung, PT Remaja Rosdakarya 2000. 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

universal, khususnya nilai-nilai persamaan, kebebasan dan pluralisme walaupun konsep operasionalnya bervariasi menurut kondisi budaya negara tertentu.

Perkembangan pengertian demokrasi modern saat ini tidak terlepas dari akibat krisis kapitalisme yang terjadi pada tahun 1930-an, serta munculnbya berbagai ideologi anti demokrasi seperti Nazisme, Fasisme, dan Militerisme yang melahirkan serta mempromosikan semangat anti demokrasi. Antara Negara-negara blok barat dan sosialis di timur mempunyai pemaknaan yang berbeda mengenai demokrasi. Di barat demokrasi lebih menekankan *Liberty* atau kebebasan individual, sedangkan di Negara-negara timur pengertian demokrasi lebih menekankan pada *equality* atau keadilan.[7]

B. Sejarah Perkembangan Demokrasi

1. Fase Klasik (Demokrasi Athena)

Fase Klasik ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran filosofis dan praksis politik dan ketatanegaraan sekitar abad ke 5 SM yang menjadi kebutuhan dari negara-negara kota (city states) di Yunani, khususnya Athena. Munculnya pemikiran yang mengedepankan demokrasi disebabkan gagalnya sistem politik yang dikusai para Tyrants atau autocrats untuk memberikan jaminan keberlangsungan terhadap Polis dan perlindungan terhadap warganya. Filsuf-filsuf seperti Thucydides (460-499 SM), Socrates (469-399 SM), Plato (427-347SM), Aristoteles (384-322 SM) merupakan beberapa tokoh terkemuka yang mengajukan

[7] Dadang Juliantara. *Meretas Jalan Demokrasi*. (Yogyakarta; Kanisius, 1998), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran-pemikiran mengenai bagaimana sebuah Polis seharusnya dikelola sebagai ganti dari model kekuasaan para autocrats dan tyrants.[8]

Konsep demokrasi sendiri telah lama diperdebatkan, pada zaman Yunani kuno permasalahan tersebut sudah menjadi perhatian para pemikir kenegaraan. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan Negara dan hukum, dalam lingkungan budaya sebuah bangsa kecil yang juga menjadi kelahiran filsafat sebagai ilmu serta salah satu pusat kreativitas seni terbesar segala zaman, yakni Yunani. Tepatnya pada tahun 508 SM, seseorang yang bernama Chleisthenes mengadakan beberapa pembaruan dalam system pemerintahan kota Athena. Bentuk pemerintahan baru itu kemudian dinamakan *demokratia,* "pemerintahan (oleh rakyat)".[9]

Asal usul demokrasi sebagai sesuatu system poitik dapat ditelusuri sampai pada sekitar lima abad sebelum masehi, ketika orang-orang Yunani yang membentuk *polis* (negara-kota) mencoba menjawab pertanyaan bagaimana suatu system politik harus diorganisasikan agar dapat memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama masyarakat. Demokrasi Yunani kuno di Athena adalah demokrasi langsung yang dipraktekkan dalam suatu Negara-kota kecil. Para warga Negara-kota, walaupun tidak seluruhnya membuat keputusan-keputusan politik secara langsung.

---

[8] http://www.averroes.or.id/book-(review/perkembangan-pemikiran-dan-praktik-demokrasi-dari-era-klasik-sampai-kontemporer.html.

[9] Abdul Ghofur,M.Ag. *Demokratisasi* ……. , 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain Chleisthenes yang dikenal sebagai bapak demokrasi Athena, tokoh-tokoh demokrasi Yunani kuno lain adalah; Solon (638-558SM) tokoh pembuat hukum, Periclles (490-429SM) jenderal negarawan dan Demosthenes (385-322SM) negarawan-orator. Masing-masing dengan kemampuannya membela demokrasi sebagai suatu system politik yang terbaik. Pada masa itu kritik tajam terhadap demokrasi dilontarkan oleh tokoh-tokoh pemikir seperti Plato dan Arsitoteles. Kedua filosof ini bukan pendukung demokrasi, tetapi kritis terhadap demokrasi. Plato sendiri menyakini bahwa suatu pemerintahan berdasarkan pilihan orang banyak (demorkasi) dapat mudah dipengaruhi oleh *damagog* (perusak) yang akhirnya merosot menjadi keditaktoran.

Dari buah pikiran merekalah prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi, yaitu persamaan (egalitarianism) dan kebebasan (liberty) individu diperkenalkan dan dianggap sebagai dasar sistem politik yang lebih baik ketimbang yang sudah ada waktu itu. Tentu saja para filsuf Yunani tersebut memiliki pandangan berbeda terhadap kekuatan dan kelemahan sistem demokrasi itu sendiri. Plato, misalnya, dapat dikatakan sebagai pengritik sistem demokrasi yang paling keras karena dianggap dapat mendegenerasi dan mendegradasi kualitas sebuah Polis dan warganya. Kendati Plato mendukung gagasan kebebasan individu tetapi ia lebih mendukung sebuah sistem politik dimana kekuasaan mengatur Polis diserahkan kepada kelompok elite yang memiliki kualitas moral, pengetahuan, dan kekuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fisik yang terbaik atau yang dikenal dengan nama "the philosopher Kings". Sebaliknya, Aristoteles memandang justru sistem demokrasi yang akan memberikan kemungkinan Polis berkembang dan bertahan karena para warganya yang bebas dan egaliter dapat terlibat langsung dalam pembuatan keputusan publik, dan secara bergiliran mereka memegang kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada warga.

Demokrasi klasik di Athena, baik dari dimensi pemikiran dan praksis, jelas bukan sebuah demokrasi yang memenuhi kriteria sebagai demokrasi substantif, karena pengertian warga (citizens) yang "egaliter" dan "bebas" pada kenyataannya sangat terbatas. Mereka ini adalah kaum pria yang berusia di atas 20 th, bukan budak, dan bukan kaum pendatang (imigran). Demikian pula demokrasi langsung di Athena dimungkinkan karena wilayah dan penduduk yang kecil (60000-80000 orang). Warga yang benar-benar memiliki hak dan berpartisipasi dalm Polis kurang dari sepertiganya dan selebihnya adalah para budak, kaum perempuan dan anak-anak, serta pendatang atau orang asing! Demikian pula, para warga dapat sepenuhnya berkiprah dalam proses politik karena mereka tidak tergantung secara ekonomi, yang dijalankan sepenuhnya oleh para budak, kaum perempuan, dan imigran.[10]

Gagasan demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan (600-1400 M). gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu

[10] http://www.averroes.or.id/book-..... html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsa Romawi, yang sedikit banyak mengenal budaya Yunani dikalahkan oleh bangsa Eropa barat. masyarakat abad pertengahan yang dimana masyarakatnya dicirikan oleh struktur masyarakat yang feodal, yang kehidupan social spiritualnya dikuasai oleh Paus dan penjabat-penjabat agama serta kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan anatara para bangsawan satu sama lain. Dengan demikian kehidupan social poitik dan agama pada masa itu hanya ditentukan oleh elit-elit masyarakat yaitu kaum bangsawan dan agamawan, karena itu demokrasi pada abad ini tidak mucul.[11] Demokrasi hanya merupakan selingan-selingan kecil yang tidak berarti di tengah-tengah rangkaian kecenderungan anti demokratik di Eropa.

2. Fase Pencerahan

Setelah tenggelam di zaman pertengahan, gagasan-gagasan demokrasi Yunani muncul kembali. Yakni pada akhir abad ke 15 dan ke 16 sebagai awal dari zaman *renaissance*. Di Eropa muncul teori politik yang mulai mempertanyakan segi-segi manusia dalam hubungan antara penguasa dan rakyat serta kedudukan agama dalam masalah-masalah public. Tokoh-tokoh pemikir seperti Nicollo Machiavelli dari Italy dengan ide sekulerismenya, dan Thomas Hobbes dari Inggris dengan ide Negara kontraknya, mulai menguak dimensi-dimensi moralitas sekuler dan hakekat hukum politik.

---

[11] Azyumardi Azhar. *Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyarakat madani*. (Jakarta; Pranada Media, 2000), 125-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada abad ke-16 dasar kekuasaan raja mutlak mengalami pergeseran dari bersifat Illahi menjadi duniawi kembali . hal ini diwalai perlawanan kaum monarchomacha terhadap raja pada abad pertengahan .pada tahun 1579 terbit sebuah buku Vindiciae Contra Tyranos , buku ini menyatakan bahwa meskipun raja dipilih oleh tuhan tetapi dia diangkat oleh rakyat .Timbulnya pemikiran ini di karenakan adanya kesewenang-wenanganyang memang terjadi pada masa itu .

Pikiran-pikiran yang dikemukakan oleh kaum monarchomacha , dinatara mereka adalah "Hugo Grotius" (1583-1645SM) dan "Thomas Hobbes" (1588-1679). mereka mengatakan bahwa bila kekuasaan yang besar tidak diberikan kepada Negara maka masyarakat akan kacau.Penadapat ini kemudian di tentang oleh "Jhon Locke" (1632-1704M) bagi locke masyarakat tersebut tidaklah kacau , itulah yang ideal, karena hak-hak manusia tidak dilanggar. Pemikiran locke berpengaruh pada gagasan kedaulatan rakyat. Buku Locke yang berjudul "*Two Triaties of Government*," menyatakan bahwa semua pemerintah yang sah bertumpu pada "persetujuan dari yang di perintah."

Pemikiran Locke ini dikembangkan oleh "Charles Louis De Secondat Baron De La Montesquieu"(1689-1755M) karyanya The spirit of law (jiwa undang-undang), buku XI , Bab 6 tentang *Of the Constitution of England* (konstitusi Inggris) menyatakan "*dalam setiap pemerintahan ada tiga kekuasaan, kekuasaan legislative; kekuasaan eksekutif dari pada urusan –urusan yang berhubungan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukum antar bangsa , dan kekuasaan kehakiman yang berhubungan dengan urusan hukum bagi warga Negara".[12]

Pada Abad 15 sampai awal 18M yang mengemuka adalah gagasan alternatif terhadap sistem Monarki Absolut yang dijalankan oleh para raja Eropa dengan legitimasi Gereja. Tokoh-tokoh pemikir era ini antara lain adalah Niccolo Machiavelli (1469-1527), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), dan Montesquieu (1689-1755). Era ini ditandai dengan munculnya pemikiran Republikanisme (Machiavelli) dan liberalisme awal (Locke) serta konsep negara yang berdaulat dan terpisah dari kekuasan eklesiastikal (Hobbes). Lebih jauh, gagasan awal tentang sistem pemisahan kekuasaan (Montesquieu) diperkenalkan sebagai alternative dari model absolutis.

pada zaman pencerahan di abad ke 17 dan ke 18 (1650-1800), pemikiran-pemikiran demokratik mulai bermunculan lagi di atas permukaan. John Locke, Jean Jacques Roussea, John Stuart Mill dan lain-lainnya mulai menolak absolutism monarki dan kekuasaan suci dari para penguasa. Tema-tema pemikiran politik pada zaman pencerahan berkisar pada masalah-masalah kebebasan, keadilan, hak asasi manusia, pembatasan atas kekuasaan pemerintah, hak untuk memberontak terhadap kesewenang-wenangan dan lain sebagainnya. Masa ini dapat dikatakan sebagai masa peletakan pondasi bagi demokrasi modern seperti yang kita kenal sekarang ini.

---

[12] http://adedidik.blogspot.com/2008/06/sejarah-perkembangan-demokrasi.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemikiran awal dalam sistem demokrasi modern ini merupakan buah dari Pencerahan dan Revolusi Industri yang mendobrak dominasi Gereja sebagai pemberi legitimasi sistem Monarki Absolut dan mengantarkan pada dua revolusi besar yang membuka jalan bagi terbentuknya sistem demokrasi modern, yaitu Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Perancis (1789). Revolusi Amerika melahirkan sebuah sistem demokrasi liberal dan federalisme (James Madison) sebagai bentuk negara, sedangkan Revolusi Perancis mengakhiri Monarki Absolut dan meletakkan dasar bagi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara universal.[13]

Pada zaman Romawi sampai dengan abad pertengahan (abad XV) pelaksanaan demokrasi memngalami kemunduran karena berkembang praktek-praktek tirani dan diktator. Tetapi, sejalan dengan waktu, arti demokrasi modern telah berevolusi pada awal abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan system demokrasi di banyak negara. Sejak zaman Renaissance (abad ke-19) ajaran demokrasi semakin berkembang dengan pertimbangan bahwa rakyat tidak senang dengan praktek-praktek sewenang-wenang para penguasa, rakyat menuntut persamaan hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan pemahaman yang lebih baik terhadap konsep-konsep atau teori-teori demokrasi yang mengarah kepada prinsip-prinsip kemerdekaan dan hak azasi manusia.[14]

---

[13] http://www.averroes.or.id/book-..... html.
[14] *http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Fase Modern

Pada awal abad 18 sampai akhir abad 20 menyaksikan bermunculannya berbagai pemikiran tentang demokrasi berkaitan dengan teori-teori tentang negara, masalah kelas dan konflik kelas, nasionalisme, ideologi, hubungan antara negara dan masyarakat dsb. Disamping itu, terjadi perkembangan dalam sistem politik dan bermunculannya negara-negara baru sebagai akibat Perang Dunia I dan II serta pertikaian ideologi khusunya antara kapitalisme dan komunisme.

Pemikir-pemikir demokrasi modern yang paling berpengaruh termasuk JJ Rousseau (1712-1778), John S Mill (1806-1873), Alexis de Tocqueville (1805-1859), Karl Marx (1818-1883), Friedrich Engels (1820-1895), Max Weber (1864-1920), dan J. Schumpeter (1883-1946). Rousseau membuat konsepsi tentang kontrak sosial antara rakyat dan penguasa dengan mana legitimasi pihak yang kedua akan diberikan, dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila ia dianggap melakukan penyelewengan.

Gagasan dan praktik pembangkangan sipil (civil disobedience) sebagai suatu perlawanan yang sah kepada penguasa sangat dipengaruhi oleh pemikiran Rousseau. Mill mengembangkan konsepsi tentang kebebasan (liberty) yang menjadi landasan utama demokrasi liberal dan sistem demokrasi perwakilan modern (Parliamentary system) di mana ia menekankan pentingnya menjaga hak-hak individu dari intervensi negara/pemerintah. Gagasan pemerintahan yang kecil dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbatas merupakan inti pemikiran Mill yang kemudian berkembang di Amerika dan Eropa Barat. De Toqcueville juga memberikan kritik terhadap kecenderungan negara untuk intervensi dalam kehidupan sosial dan individu sehingga diperlukan kekuatan kontra yaitu masyarakat sipil yang mandiri.

Marx dan Engels merupakan pelopor pemikir radikal dan gerakan sosialis-komunis yang menghendaki hilangnya negara dan munculnya demokrasi langsung. Negara dianggap sebagai "panitia eksekutif kaum burjuis" dan alat yang dibuat untuk melakukan kontrol terhadap kaum proletar. Sejauh negara masih merupakan alat kelas burjuis, maka keberadaannya haruslah dihapuskan (*withering away of the state*) dan digantikan dengan suatu model pemerintahan langsung di bawah sebuah diktator proletariat. Dengan mendasari analisa mereka mengikuti teori perjuangan kelas dan materialism dialektis, Marx dan Engels menganggap sistem demokrasi perwakilan yang diajukan oleh kaum liberal adalah alat mempertahankan kekuasaan kelas burjuis dan karenanya bukan sebagai wahana politik yang murni (genuine) serta mampu mengartikulasikan kepentingan kaum proletar.

Max Weber dan Schumpeter adalah dua pemikir yang menolak gagasan demokrasi langsung ala Marx dan lebih menonjolkan sistem demokrasi perwakilan. Mereka berdua mengemukakan demokrasi sebagai sebuah sistem kompetisi kelompok elite dalam masyarakat, sesuai dengan roses perubahan masyarakat modern yang semakin terpilah-pilah menurut fungsi dan peran. Dengan makin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembangnya birokrasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sistem pembagian kerja modern, maka tidak mungkin lagi membuat suatu sistem pemerintahan yang betul-betul mampu secara langsung mengakomodasi kepentingan rakyat. Demokrasi yang efektif adalah melalui perwakilan dan dijalankan oleh mereka yang memiliki kemampuan, oleh karenanya pada hakekatnya demokrasi modern adalah kompetisi kaum elit.

4. Fase Kontemporer

Perkembangan pemikiran demokrasi dan praksisnya pada era kontemporer menjadi semakin kompleks, apalagi dengan bermunculannya negara-negara bangsa dan pertarungan ideologis yang melahirkan blok Barat dan Timur, kapitalisme dan sosialisme/komunisme. Demokrasi menjadi jargon bagi kedua belah pihak dan hampir semua negara dan masyarakat pada abad keduapuluh, kendatipun variannya sangat besar dan bahkan bertentangan satu dengan yang lain.

Demokrasi kemudian menjadi alat legitimasi para penguasa, baik totaliter maupun otoriter di seluruh dunia. Di negara-negara Barat seperti Amerika dan Eropa, pemahaman demokrasi semakin mengarah kepada aspek prosedural, khususnya tata kelola pemerintahan (governance). Pemikir seperti Robert Dahl umpamanya menyebutkan bahwa teori demokrasi bertujuan memahami bagaimana warganegara melakukan control terhadap para pemimpinnya. Dengan demikian focus pemikiran dan teori demokrasi semakin tertuju pada masalah proses-proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan umum atau kompetisi partai-partai politik, kelompok kepentingan, dan pribadi-pribadi tertentu yang memiliki pengaruh kekuasaan.

Dengan hancurnya blok komunis/sosialis pada penghujung abad ke duapuluh, demokrasi seolah-olah tidak lagi memiliki pesaing dan diterima secara global. Fukuyama bahkan menyebut era paska perang dingin sebagai Ujung Sejarah (*the End of History*) di mana demokrasi (liberal), menurutnya, menjadi pemenang terakhir. Pada kenyataannya, sistem demokrasi di dunia masih mengalami persoalan yang cukup pelik karena komponen-komponen substantif dan prosedural terus mengalami penyesuaian dean tantangan. Kendati ideologi besar seperti sosialisme telah pudar, namun munculnya ideologi alternatif seperti fundamentalisme agama, etnis, ras, dsb telah tampil sebagai pemain dan penantang baru terhadap demokrasi, khususnya demokrasi liberal.[15]

Dilihat dari sudut sejarah, praktek politik demokrasi dalam wujud empiric, dapat diidentifikasi telah terjadi beberapa tahapan transformasi (dalam istilah Dahl) . Robert A. Dahl membagai perjalanan sejarah praktek demokrasi ke dalam tiga tahap transformasi. Pertama adalah demokrasi yang kecil ruang lingkupnya, berbentuk demokrasi langsung. Tahap transformasi ini terjadi dalam praktik politik Yunani dan Athena. Kedua demokrasi yang diwujdukan dengan diperkenalkannya praktek republikanisme, perwakilan dan logika persamaan. Dan ketiga dialami oleh kehidupan politik modern saat ini, yang dicirikan oleh belum adanya kepastian

[15] http://www.averroes.or.id/book-..... html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah kita akan kembalai ke masyarakat kecil semacam Yunani kuno dan Athena ataukah ke bentuk lain.[16]

Sementara itu, dalam semangat yang sama, Samuel P. Huntington memaparkan sejarah praktek demokrasi dengan cara yang agak berbeda. Dia membagi sejarah pelaksanaan demokrasi di dunia ke dalam tiga gelombang. Pertama berakar pada revolusi Amerika dan Perancis dengan ditandai dengan tumbuhnya institusi-institusi nasional yang demokratis, gelombang kedua dimulai pada perang dunia II , dan gelombang ketiga dimulai pada tahun 1974 ditandai oleh berakhirnya keditaktoran Portugal dan terus berlanjut dengan gelombang besar demokratisasi di seluruh bagian dunia secara spektakuler hingga tahun 1900.

C. Perkembangan Demokrai di Indonesia

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan dalam berbagai kurun waktu, yaitu:

1. Kurun waktu 1945 – 1949

Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya

[16] Abdul Ghofur, *Demokratisasi* ...., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presidensil dalam pelaksanaannya menjadi Parlementer seperti yang berlaku dalam Demokrasi Liberal.

2. Kurun Waktu 1949 – 1950

Pada periode ini berlaku Konstitusi RIS. Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah Demokrasi Parlementer (Sistem Demokrasi Liberal). Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai lambang. Karena pada umumnya rakyat menolak RIS, sehingga tanggal 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyatakan kembali ke Negara Kesatuan dengan UUDS 1950.

3. Kurun Waktu 1950 – 1959

Pada periode ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal dan diberlakukan UUDS 1950. Karena Kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar,masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya.Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.

4. Kurun Waktu 1959 – 1965

Pada periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. UUD yang digunakan adalah UUD 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut UUD 1945 presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, akan tetapi presiden menafsirkan "terpimpin", yaitu pimpinan terletak ditangan 'Pemimpin Besar Revolusi".Dengan demikian pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaanoleh PKI pada tanggal 30 September 1965 (G30S/PKI) yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia.

5. Kurun Waktu 1966 – 1998

Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Secara tegas dilaksanakan sistem Demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsilembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat UUD 1945. Demokrasi Pancasila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden, sehinggaterjadilah penyalahgunaan kekuasaan, dengan tumbuh suburnya budaya korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN). Kebebasan bicara dibatasi, praktek demokrasi menjadisemu. Lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasidalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diriSoeharto sebagai presiden.

6. Kurun Waktu 1998 - sekarang (Orde Reformasi)

Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalahdemokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, denganpenyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidakdemokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negaradengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu padaprinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembagaeksekutif, legislatif dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR - MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah kemerdekaan hingga sekarang setidaknya Indonesia telah menerapkan enam macam demokrasi yang berbeda. Pertama, demokrasi pancasila yakni pemerintahan darurat dalam rangka awal kemerdekaan. Kedua yakni Konstituti RIS, kemudian Demokrasi Parlementer yang sampai tujuh kali pergantian kabinet. Keempat zaman orde lama yang berakhir tragis dan selanjutnya zaman orde lama yang berakhir ricuh. Sekarang Indonesia pada masa reformasi, maksudnya seluruh rakyat Indonesia berhak mengemukaan pendapatnya tentang kebijakan pemerintahan yang berjalan.

Dalam beberapa hal, demokrasi yang pernah dijalankan Indonesia memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Pada masa Demokrasi Pancasila, Indonesia belum ada kemajuan apa-apa. Ini dapat dimaklumi karena Indonesia baru merdeka dan masih belajar untuk mengurus negaranya. Selanjutnya pada masa Konstitusi RIS hanya membuat penentangan dari gerakan separatis agar kembali ke negara Kesatuan, karena mereka menganggap negara serikat bertentangan dengan azas negara Indoneia. Demokrasi Parlementer yang telah terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali yang menyebabkan stabilitas negara tidak baik. Namun demikian, berbagai kabinet yang jatuh-bangun pada masa itu telah memperlihatkan berbagai ragam pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin namun mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa orde lama, kemajuan di bidang militer dan ketenaran Soekarno sebagai pemimpin tertinggi negara Indonesia menyebabkan kewibawaan yang tinggi di mata dunia internasional dan kekuatan militer yang patut diperhitungkan di Asia. Namun pada sisi lain segi ekonomi rakyat kurang terperhatikan akibat berbagai kebijakan politik pada masa itu. Pada masa ini, Indonesia mengalami penyimpangan di bidang politik luar negeri, karena politik Indonesia mengarah kepada politik konfrontasi dan meninggalkan politik bebas-aktif. Ini menyebabkan retaknya hubungan dengan Malaysia dan berujung pada keluarnya Indonesia dari PBB. September 1965, zaman orde lama berakhir tragis. PKI memberontak di berbagai daerah. Presiden Soekarno tak dapat berbuat apa-apa karena kepentingan doktrin NASAKOM (Nasionalis, Agamis, Komunis) yang telah dibinanya bertahun-tahun.

Selanjutnya Pada masa Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun ini, Indonesia juga menata kembali politik luar negerinya. Hal ini dapat dilihat dari Indonesia kembali menjadi Anggota PBB, normalisasi hubungan dengan Malaysia, membangun ASEAN bersama empat negara lainnya, dan keikusertaan dalam beberapa organisasi internasional.

Pemasungan kebebasan berbicara ternyata menjadi bola waktu yang semakin membesar yang siap meledak. Bom waktu ini telah terakumulasi sekian lama dan ledakannya terjadi pada bulan Mei 1998. Runtuhnya Soeharto menjadi awal baru pembentukan pemerintahan reformasi. Selain terjadinya kenaikan harga barang dan jasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa kali dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, ketidakstabilan keamanan dan politik serta KKN bersamaan terjadi sehingga yang paling terkena dampaknya adalah rakyat kecil yang jumlahnya mayoritas dan menyebabkan posisi Indonesia sangat lemah di mata internasional akibat tidak adanya kepemimpinan yang kuat.

Namun demikian, demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia memperlihatkan beberapa kemajuan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pemilihan umum dengan diikuti banyak partai adalah sebuah kemajuan yang harus dicatat. Disamping itu pemilihan presiden secara langsung yang juga diikuti oleh pemilihan kepala daerah secara langsung adalah kemajuan lain dalam tahapan demokratisasi di Indonesia. Diluar hal tersebut, kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi di masyarakat juga semakin meningkat. Para rakyat kecil mampu menyuarakan keluhan mereka di depan publik sehingga masalah-masalah yang selama ini terpendam dapat diketahui oleh publik. Pemerintah pun sangat mudah dikritik bila terlihat melakukan penyimpangan dan bisa diajukan ke pengadilan bila terbukti melakukan kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan publik.

Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia belum memikirkan kaum lemah dan hanya memikirkan mereka yang kuat di kancah perpolitikan Indonesia. Bagi kaum lemah, demokrasi belum memberikan dampak ekonomi yang positif buat mereka. Inilah yang menjadi tantangan pemerintahan Indonesia yakni bagaimana meratakan demokrasi di Indonesia. Ini dapat dilakukan dari pejabat-pejabat yang bersifat egois dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencuru uang negara untuk kaum lemah. Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia, demokrasi memiliki kaitan yang erat dengan pemenuhan hak asasi manusia, karena dengan demokrasi hak untuk berpendapat berserikat dn berkumpul sudah ditetapkan.

Oleh sebab itu, segenap rakyat Indonesia harusnya memberikan aspirasi dan kritikan terhadap jalannya pemerintahan. Jika rakyat sudah mulai memberikan aspirasi dan kritikan, sebaiknya pemerintah memberikan informasi bagaimana memberikan suatu asirasi dan kritikan dengan baik, agar tidak ada lagi demonstrasi yang anarkis. Demokrasi diharapkan mampu menjadikan negara kuat. Demokrasi di negara kuat (seperti Amerika) akan berdampak positif bagi rakyat. Sedangkan demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia tanpa menghasilkan negara yang kuat justru tidak akan mampu mensejahterakan rakyatnya. Negara yang kuat tidak identik dengan otoritarianisme maupun militerisme.[17]

D. Macam-Macam Demokrasi

Secara umum ada dua konsep yang dominan dalam diskursus demokrasi modern, yaitu konsep demokrasi barat dan demokrasi komunis. Demokrasi barat yang lebih menekankan pada elemen-elemen procedural bagi sebuah sturktur demokratis, sebaliknya konsep demokrasi komunis lebih menekankan pada elemen-elemen substantif. Setelah runtuhnya komunisme Uni Soviet pada akhir dekade1980-an, mau tidak mau membuat konsep demokrasi barat menjadi satu-satunya konsep yang

[17] http://bebekberanak.blogspot.com/2009/02/perkembangan-demokrasi-di-indonesia.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dominan dan bahkan diterima oleh hampir seluruh kawasan geo-politik masyarakat sejagad.[18]

Berikut ini pengertian secara lebih jelas dari demokrasi liberal dan demokrasi komunis:

1. Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.

Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat

[18] Umaruddin Masdar. *Membaca* ..., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Perancis).[19]

Demokrasi liberal lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik sebagai individu ataupun masyarakat. Dan karenanya lebih bertujuan menjaga tingkat represetansi warganegara dan melindunginya dari tindakan kelompok atau negara lain. Ciri-ciri demokrasi liberal :

- Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusiadapat terkontrol
- Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional,
- Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundangan,
- Kelompok minoritas (agama, etnis) boleh berjuang, untuk memperjuangkan dirinya

2. Demokrasi Komunis

Demokrasi Komunis adalah demokrasi yang sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. Demokrasi komunis muncul karena adanya komunisme. Awalnya komunisme lahir

[19] http://sriyandi.wordpress.com/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh.

Komunisme adalah ideology yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme.

Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi "tumpul" dan tidak lagi diminati. Masyarakat sosialis-komunis mendefinisikan rakyat sebagai lapisan rakyat yang menurut mereka, adalah rakyat miskin dan tertindas di segala bidang kehidupan.

Rakyat miskin (kaum proletar dan buruh) akan memimpin revolusi sosialis melalui wakil-wakil mereka dalam partai komunis. Kepentingan yang harus diperjuangkan bukanlah kemerdekaan pribadi. Bahkan, kemerdekaan pribadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut masyarakat sosialis-komunis harus ditiadakan karena satu-satunya kepentingan hanyalah kepentingan rakyat secara kolektif, yang dalam hal ini diwakili oleh partai komunis. Dengan demikian masyarakat sosialis-komunis, juga mengakui kedaulatan rakyat. Mereka pun menjunjung tinggi demokrasi, yang dikenal sebagai demokrasi komunis.

Sementara itu dari segi lain, Demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat dapat dibagi menjadi:

1. Demokrasi Langsung

Dipraktikkan di negara-negara kota (*polis, city state*) pada zaman Yunani Kuno. Pada masa itu, seluruh rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara langsung. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui – secara langsung pula aspirasi dan persoalan-persoalan yang sebenarnya dihadapi masyarakat. Tetapi dalam zaman modern, demokrasi langsung sulit dilaksanakan karena:

- sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat sekaligus dalam membicarakan suatu urusan;
- tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan negara yang semakin rumit dan kompleks;
- musyawarah tidak akan efektif, sehingga sulit menghasilkan keputusan yang baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Demokrasi Tidak Langsung Atau Demokrasi Perwakilan.

Sistem demokrasi (menggantikan demokrasi langsung) yang dalam menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam parlemen. Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakil mereka dalam parlemen. Tipe demokrasi perwakilan berlainan menurut konstitusi negara masing-masing.

Sistem pemilihan ada dua macam, yaitu: pemilihan secara langsung dan pemilihan bertingkat. Pada pemilihan secara langsung, setiap warga negara yang berhak secara langsung memilih orang-orang yang akan duduk di parlemen. Sedangkan pada pemilihan bertingkat, yang dipilih rakyat adalah orang-orang di lingkungan mereka sendiri, kemudian orang-orang yang terpilih itu memilih anggota-anggota parlemen.

3. Demokrasi Perwakilan Dengan Sistem Referendum.

Dalam sistem demokrasi ini rakyat memilih para wakil mereka untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen tetap dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum (pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung). Sistem ini digunakan di salah satu negara bagian Swiss yang disebut Kanton.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DEMOKRASI

DALAM PERSPEKTIF ABDURRAHMAN WAHID

A. Biografi Abdurrahman Wahid

1. Riwayat Singkat

Abdurrahman Wahid lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Denanyar, Jombang. Dia merupakan putra pertama dari enam saudara. Ayahnya, KH. Wahid Hasyim merupakan seorang menteri agama RI pertama dan aktif dalam panitia Sembilan yang merumuskan piagam Jakarta. Ibunya, Hj. Sholehah merupakan putrid dari KH. Bisri Syamsuri pendiri pesantren Denanyar Jombang. Sedangkan ayahnya Abdurrahman Wahid adalah putra KH. Hasyim Asyari merupakan pendiri *Jum'iyyah Nahdhatul Ulama (NU).* Abdurrahman Wahid adalah cucu dari dua ulama terkemuka NU dan tokoh besar bangsa Indonesia. Lebih dari itu, Abdurrahman Wahid adalah keturunan Brawijaya IV (Lembu Peteng) lewat dua jalur, yakni Ki Ageng Tarub I dan Joko Tingkir.[1]

---

[1] Marzuki Wahid. *BEYOND THE SYMBOLS "Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur"*.(Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000). 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jombang merupakan kota kecil yang berada di wilayah Jawa Timur. Kota ini merupakan saksi bisu lahirnya sejumlah tokoh besar dalam diskursus pemikiran dan gerakan sosial keagamaan di Indonesia. Sederet pemikir, intelektual dan ulama, lahir dan besar dalam latar sosial kota Jombang dengan keunikannya masing-masing. Sebut saja, *Khadrat-u al-Syaikh* KH. Muhammad Hasyim Asy'ari pendiri Pesantren Tebuireng yang fenomenal sekaligus pendiri organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU).[2] Dari Jombang ini pula bermunculan sejumlah tokoh-tokoh penting dalam konstelasi gerakan social keagamaan; KH. Abdul Wahid Hasyim, KH. Yusuf Hasyim, dan belakangan muncul tokoh tokoh garda depan yang cukup mengedepan, KH. Abdurrahman ad-Dakhil atau KH. Abdurrahman Wahid yang popular disebut Gus Dur, di samping tentu saja ada tokoh lain yang cukup diperhitungkan misalnya KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syamsuri, termasuk di dalamnya Nurcholis Madjid.[3]

Dari sederet nama tersebut, Abdurrahman Wahid barangkali menjadi sosok paling unik, khas, dan cukup fenomenal. Tidak saja dalam 'jagad' NU, tetapi juga 'jagad' ke-Indonesia-an. Nama asli Abdurrahman Wahid, Abdurrahman ad-Dakhil sendiri mempunyai arti sang penakluk, nama ini diambil dari jejak khalifah

---

[2] NU (Ar Nahdah al-Ulama = Kebangkitan Ulama). Didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344/31 Januari 1926 di Surabaya atas prakarsa KH. Hasyim Ays'ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah. NU Berakidah Islam menurut Paham "ahlusunah waljamaah dan menganut mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hanbali), asasnya adalah Pancasila, tujuan didirikannya ialah untuk memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlusunah Waljamaah dan menganut mazhab empat di tengah-tengah kehidupan di dalam wadah Negara kesautan Republik Indonesia yang berdasarkan Pncasila (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam 3*. PT Ichtiar BaruVan Hoeve, Jakarta 1994) hal 345.

[3] Listiono Santoso. *Teologi Politik Gus Dur*. Yogyakarta, AR-RUZZ, 2004. Hal 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdurrahman yang berhasil menakhlukkan Spanyol dan berhasil mendirikan dinasti disana.[4]

Latar belakang keluarga yang demikian membuat Abdurrahman Wahid secara genetic utamanya berasal dari tradisi pesantren dan merupakan darah biru. Abdurrahman Wahid tergolong sebagai seorang santri dan priyayi sekaligus dalam tipologi masyarakat Jawa. Dalam genealogi yang demikian, tidak diragukan lagi bahwa Abdurrahman Wahid berada pada posisi inti dalam kosmologi dan emosi komunitas. Factor geneologi tersebut membuat Abdurrahman Wahid tidak saja sangat dihormati dalam kultur pesantren, tapi memberikan kedudukan yang cukup disegani dalam strata sosial di Indonesia.[5] Meskipun demikian, sejarah kehidupan Abdurrahman Wahid tidak mencerminkan kehidupan seorang ningrat. Dia berproses dan hidup sebagaimana layaknya masyarakat kebanyakan.

Di jombang, Abdurrahman Wahid mengalami suatu pertemuan yang jauh lebih penting daripada pertemuannya dengan karya-karya sastra pengarang-pengarang terkenal yang dibacannya dengan penuh gairah.. Ia tertarik kepada siswi di madrasah dia mengajar. Gadis tersebut bernama Siti Nuriyah yang merupakan salah satu dari gadis-gadis yang paling menarik di kelasnya.[6]

Abdurrahman Wahid kemudian menikah dengan Siti Nuriyyah , gadis asal Tambakberas, Jombang. Perkawinan Abdurrahman Wahid sendiri dilakukan

---

[4] Abdurrahman Nusantari. *Ummat Menggugat Gusdur*. (Bekasi: Aliansi pecinta syariat, 2006), 21.
[5] Listiono Santoso. *Teologi* ..., 68.
[6] Greg Barton. *Biografi Gus Dur* (Yogyakarta; LKiS. 2002) Hal 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui perkawinan wali atau perkawinan jarak jauh tanggal 11 Juli 1968. Disaat pernikahan itu Abdurrahman Wahid masih berada di Messir dan untuk kembali ke Indonesia sangat tidak memungkinkan. Kyai Bisri-lah yang kemudian menjadi wakil penganten laki-laki.[7] Dari hasil perkawinannya dengan Siti Nuriyyah, menghasilkan empat orang anak yang kebetulan semuannya perempuan. Mereka adalah Alisa Qotrunnada Munawwarah (Lisa), Zannuba Arifah Chafsof (Yeni), Anita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari.

Pada Januari 1998, Gus Dur diserang stroke dan berhasil diselamatkan oleh tim dokter. Namun, sebagai akibatnya kondisi kesehatan dan penglihatan Presiden RI ke-4 ini memburuk. Selain karena stroke, diduga masalah kesehatannya juga disebabkan faktor keturunan yang disebabkan hubungan darah yang erat diantara orangtuanya. Dalam keterbatasan fisik dan kesehatnnya, Gus Dur terus mengabdikan diri untuk masyarakat dan bangsa meski harus duduk di kursi roda. Gus Dur wafat pada hari Rabu, 30 Desember 2009, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit, terutama gangguan ginjal, yang dideritanya sejak lama. Sebelum wafat ia harus menjalani hemodialisis (cuci darah) rutin. Seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta ia sempat dirawat di Jombang seusai mengadakan perjalanan di Jawa Timur. Gus Dur di makamkan di Jombang Jawa Timur

[7] Ma'mun Murod Al-Brebesy. *Menyikapi Pmikiran Politik Gusdur & Amien Rais tentang Negara.* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perjalanan Pendidikan

Perjalanan intelektualnya memang cukup unik. Betapa tidak, meskipun berasal dari keluarga santri, sebagian jenjang pendidikan formal Abdurrahman Wahid ditempuh di sekolah-sekolah sekuler. Abdurrahman Wahid pertama kali belajar agama kepada kakeknya, KH. Hasyim Asy'ari. Ketika ayahnya pindah ke Jakarta, Abdurrahman Wahid masuk Sekolah Rakyat (SR) dan lulus pada tahun 1953, sembari belajar bahasa Belanda dengan Willem Buhl yang selalu menyajikan music klasik barat kepadannya. Itulah awal dimana Abdurrahman Wahid kecil bersentuhan dengan kebudayaan barat.

Pada tahun 1953-1957, Abdurrahman Wahid belajar di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) Gowongan, Yogyakarta yang dikelola oleh Gereja Katolik Roma. bersamaan dengan itu, ia nyantri sekaligus belajar bahasa Arab di pondok pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta di bawah bimbingan KH. Ali Maksum. Menariknya, Abdurrahman Wahid ternyata lebih memilih tinggal di luar pesantren, dengan alasan ingin hidup bebas tanpa aturan pesantren yang mengikat, dan tinggal di rumah seorang ketua tarjih Muhammadiyah Yogyakarta, KH. Junaidi. Di lingkungan KH. Junaidi inilah Abdurrahman Wahid mulai melakukan interaksi dengan 'dunia luar' yang selama ini melingkupinya.[8]

Selama menjadi siswa SMEP itu Abdurrahman Wahid memiliki hobi membaca yang cukup besar. Di dorong untuk menguasai bahasa Inggris, sehingga

[8] Listiono Santoso. *Teologi* ..., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam tempo satu-dua tahun, dia bisa menyelesaikan beberapa buku bahasa Inggris. Di antara penulis-penulis barat yang telah dibacannya antara lain Ernest Hemingway, Jhon Steinbach, William Faulkner, Johan Huizinga, Andre Malraux, Ortega Y. Gasset. Dia juga membaca karya penulis-penulis Rusia seperti Pushkin, Tolstov, Doestoevky, dan mikhail Solokov. Selain itu dia juga menamatkan buku *the story of civilazation,* karya Will Durant.

Ketika melihat Abdurrahman Wahid pandai bahasa Inggris dan rajin membaca, salah seorang gurunya di SMEP Gowongan, Soemantri, memberi buku karya Lenin, *What Is to be done*? Tidak lama dari itu Abdurrahman Wahid telah mengenal Das kapital karya Karl Marx, filsafat Plato, Thales, dan sebagainnya. Di usia yang relatif hijau (15 tahun) Abdurrahman Wahid sudah mulai berfikir liar dengan buku-buku yang telah dibacannya. Lewat buku inilah, tampaknya yang telah mengantarkan Abdurrahman Wahid untuk berfikir liberal dan terkadang terlalu "ndaki".[9] Selain sebagai kutu buku dan pengemar musik, Abdurrahman Wahid juga mempunyai hobi cukup aneh sebagai seorang santri , yaitu nonton film-film Eropa dan Amerika yang saat itu tengah membanjiri Yogyakarta.

Setamat dari SMEP, Abdurrahman Wahid melanjutkan belajar di pesantren Tegalrejo Magelang, yang diasuh oleh KH. Chudhari. Kyai Chudlori memperkenalkan Abdurrahman Wahid dengan ritus-ritus sufi dan menanamkan

---

[9] Ma'mun Murod Al-Brebesy. *Menyikapi* ..., 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktek-praktek ritual mistik. Di pesantren ini Abdurrahman Wahid merasa menemukan kembali dunia spiritualnya yang pernah hilang selama di Yogyakarta.

Di bawah bimbingan kyai ini pula, Abdurrahman Wahid mulai mengadakan ziarah ke kuburan-kuburan keramat para wali di Jawa. Setelah dua tahun di Tegalrejo, pada paro 1959, KH. Abduul Fatah Hasyim, paman Abdurrahman Wahid memintanya kembali ke Jombang, tinggal di pesantren Tambak beras untuk mengurusi sekolah Mu'allimat, di mana selah satu muridnya adalah Siti Nuriyah, yang kemudian menjadi istri Abdurrahman Wahid. Kerinduan terhadap Yogyakarta memaksa Abdurrahman Wahid kembali pada tahun 1963 untuk belajar lagi di Krapyak hingga pada tahun 1964.

Perjalanan intelektualitas Abdurrahman Wahid semakin mendapat pengukuhan, Pada tahun 1962, atas biaya dari departemen Agama, Abdurrahman Wahid melanjutkan pendidikannya di Mesir, yakni di Universitas Al Azhar dengan mengambil *Departement Of Higher Islamic and Arabic Studies.*[10] Belajar di Al-Azhar University tidak memuaskan gairah intelektualitasnya, karena hanya bertumpu pada hafalan, dan tidak ada ubahnya dengan model pesantren yang selama ini digelutinya.[11] Atmosfer yang tidak mendukung tersebut membuat Abdurrahman Wahid memutuskan berhenti di tengah jalan.

---

[10] Ibid., 107.
[11] Listiono Santoso. *Teologi* ..., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika Al-Azhar University dipandang tidak lagi kondusif, Abdurrahman Wahid memutuskan untuk berhenti di tengah jalan. Selama tiga tahun di Mesir ini Abdurrahman Wahid sering mengunjungi perpustakaan diantaranya perpustakaan Kairo, Perpustakaan Amerika dan perpustakaan Prancis. dan pusat layanan informasi Amerika (USIS) dan toko-toko buku dimana ia dapat memperoleh buku-buku yang dikehendakinya, sekaligus menyalurkan hasratnya menikmati musik-musik klasik, film-film dan sepakbola.

Meskipun relative kecewa dengan situasi Al-Azhar University yang tidak kondusif, tetapi Abdurrahman Wahid menemukan kenikmatan lain tentang kehidupan cosmopolitan Kairo. Bahkan Mesir, dibawah kepemimpinan Presiden Gamal Abdul Nasser, boleh dikatakan sebagai wilayah yang sangat kondusif bagi berkembangnya dsikursus intelektualitas. Kebebasan bertukar pendapat mendapat perlindungan yang cukup. Misalnya, para pendukung Negara Islam Mesir melakukan debat terbuka dengan kaum sosialis di buku-buku, surat kabar dan koloom-kolom majalah. Di Mesir ini pula, Abdurrahman Wahid tertarik pada paham sosialismeyang berbudaya yang memang relative berkembang di tanah Arab saat itu.

Tahun1966 Abdurrahman Wahid pindah ke Irak, sebuah Negara Modern pada waktu itu, yang memiliki peradaban Islam yang cukup maju. Di Irak di masuk *departement of religion,* di universitas Bagdad sampai tahun 1970. Selama di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bgadad Abdurrahman Wahid mendapat pengalaman hidup yang berbeda dengan di Mesir. Di Irak dia mendapat rangsangan intelektual, dan disini ia kembali bersentuhan dengan buku-buku karya orientalis barat.[12] Atmosfer intelektualitas yang baik disertai dengan kondisi di Bagdad tersebut sedikit banyak cukup membantu semangat Abdurrahman Wahid untuk memperkaya khazanah pengetahuannya. Di kota ini, ia banyak membaca pemikiran Emile Durkheim dan filsuf-filsuf Barat lainnya yang berpengaruh.

Di luar kampus Abdurrahman Wahid rajin mengunjungi makam-makam keramat para wali, termasuk Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Disinilah Abdurrahman Wahid menemukan sumber spiritualitasnya. Kondisi politik yang terjadi di Irak, ikut mempengaruhi pemikiran politik Abdurrahman Wahid pada saat itu. Semula dia mengagumi nasionalisme Arab, dengan tokohnya Saddam Husain. Tetapi ketika Syekh sufi yang dikenalnya tewas terbunuh, kekaguman itu meluntur

Setelah dari Bagdad, ketertarikan Abdurrahman Wahid pada pemikiran barat sebagaimana yang didapat dalam berbagai bacaan, membuat dia memutuskan untuk mengenyam pendidikan liberal Eropa (Jerman). tetapi akhirnya gagal karena persyaratannya ketat, yaitu menguasai bahasa Jerman, Hebrew (Ibrani Yahudi), Yunani dan Latin. Dan juga kualifikasi mahasiswa Timur Tengah saat itu tidak diakui oleh Universitas-Universitas Eropa. Akhirnya ia memilih belajar keliling dari universitas ke universitas. Kemudian dia menetap di Belanda selama 6 bulan. Di

[12] Abdurrahman Nusantari. *Ummat* ..., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sana dia mendirikan perkumpulan pelajar Muslim Indonesia Malaysia yang sedang belajar di Eropa. Abdurrahman Wahid juga sempat pergi ke McGill University Kanada untuk mempelajari kajian-kajian keislaman secara mendalam.

3. Perjalanan karir

Sepulang dari pegembaraanya mencari ilmu, Abdurrahan Wahid kembali ke Jombang dan memilih menjadi guru. Pada tahun 1971, tokoh muda ini bergabung di Fakultas Ushuludin Universitas Tebu Ireng Jombang. Tiga tahun kemudian ia menjadi sekretaris Pesantren Tebu Ireng, dan pada tahun yang sama Gus Dur mulai menjadi penulis. Ia kembali menekuni bakatnya sebagai penulis dan kolumnis. Lewat tulisan-tulisan tersebut gagasan pemikiran Gus Dur mulai mendapat perhatian banyak. Djohan Efendi, seorang intelektual terkemuka pada masanya, menilai bahwa Gus Dur adalah seorang pencerna, mencerna semua pemikiran yang dibacanya, kemudian diserap menjadi pemikirannya tersendiri. Sehingga tidak heran jika tulisan-tulisannya jarang menggunakan foot note. Sebagai seorang sekretaris, Abdurrahman Wahid sering diundang dalam forum keagamaan dan kepesantrenan di dalam maupun di luar negeri.

Tahun 1979 Abdurrahman Wahid Hijrah ke Jakarta, di Jakarta ia mulai merintis karirnya di PBNU dan mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah sebelum akhirnya mendirikan pesantren di Ciganjur. Tahun 1980 dia dipercaya sebagai wakil Katib syuriah PBNU. Disini Abdurrahman Wahid terlibat dalam diskusi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdebatan serius mengenai masalah agama, sosial dan politik dengan berbagai kalangan lintas agama, suku dan disiplin.

Ibu kota Jakarta inilah menjadi tempat awal yang menaikkan posisi intelektualitas Abdurrahman Wahid. Dia kemudian bersentuhan dengan berbagai pemikir di Indonesia serta menjadi aktivis di lembaga swadayamasyarakat (LSM), utamannya LP3ES. Keterlibatan tersebut telah membuat pemikiran Abdurrahman Wahid seolah keluar dari *mainstream* logika kepesantrenan.[13] Pada tahun 1982-1985 Abdurrahman Wahid diberi kepercayaan duduk sebagai ketua dewan kesenian Jakarta, dan juga pernah menjadi juri festival film Indonesia yang pada saat itu masih dianggap tabu oleh kaum santri (NU).[14]

Tahun 1984 Abdurrahman Wahid terpilih sebagai ketua umum PBNU, banyak kalangan yang menaruh harapan besar kepada Abdurrahman Wahid untuk bisa membawa NU lebih maju dan independen baik dalam percaturan politik, sosial maupun intelektual. Dan harapan-harapan itu, meskipun tidak semuanya diperjuangkan secara konsisten sampai NU kemudian menjadi ormas Islam yang dianggap sangat independen dan maju dengan memiliki kiai-kiai yang kharismatik yang kritis dan intelektual-intelektual muda yang sangat responsif terhadap perubahan.[15] pada muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan itu dirahinya kembali

---

[13] Listiono Santoso. *Teologi* ..., 84.

[14] Umaruddin Masdar. *Membaca pemikiran Gusdur dan Amien Rais Tentang Negara*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999. Hal 120.

[15] Ibid Hal 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada muktamar NU ke-28 di pesantren Krapyak Yogyakarta (1989) dan pada muktamar NU di Cipasung Jawa Barat (1994).selain sebagai ketua PBNU, Abdurrahman Wahid juga pernah menjabat sebagai ketua Fordem (forum demokrasi) periode 1991-1999. Dalam forum ini duduk sejumlah anggota dari kalangan nasionalis dan non Muslim.

Melalui sidang umum MPR, Abdurrahman Wahid diangkat sebagai Presiden RI ke-4, mengantikan BJ. Habibie, pada Oktober 1999. Meskipun sudah menjadi Presiden, ke-nyeleneh-an Abdurrahman Wahid tidak hilang, bahkan semakin diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Sikap nyeleneh seorang pemikir. Setelah susah payah mempertahankan diri, akhirnya pada tanggal 24 Juli 2004, Abdurrahman Wahid dijatuhkan secara tidak terhormatdari jabatan RI melalui sidang Istimewa MPR.[16]

Selain sebagai ketua PBNU dan Presiden RI, selama hidupnya banyak jabatan yang pernah ia pangku, antara lain ialah: Ketua dewan syura PKB, pendiri *The Wahid institute,* Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Anggota MPR (1989-1993), ketua MUI, pendiri dan anggota forum demokrasi (1990-1999), ketua dewan kesenian Jakarta (1982-1985). Selain itu dia menjadi pendiri dan anggota *Shimon Perez center for peace* di Israel, pernah menjadi presiden *World Conference of religion and peace* yang berkedudukan di New York, menjadi anggota internasional *internasional strategic dialogue center Universitas Netanya*

[16] Listiono Santoso. *Teologi* ..., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Israel, Abdurrahman Wahid juga menjadi presiden kehormatan *International Islamic Christian Organization for Reconciliation and Recontruction* yang berkedudukan di London Inggris, menjadi Presiden Non Violence Peace Movement di Seoul Korea Selatan, dan lain-lain jabatan.

4. Penghargaan dan Karya-Karyanya

Sebagai implikasi dari pemikiran dan gerakan sosialnya, Abdurrahman Wahid mendapat penghargaan-penghargaan, antara lain:

a) *Anugrah Mpu peradah* dari DPP Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, Jakarta, Indonesia,

b) *The Culture of Peace Distinguished Award 2003,* dari Internasional Culture of Peace Project religions for Peace di Trento Italia (2004),

c) *Global Tolerance Award,* dari Friends of the united Nations, berkedudukan di New York Amerika Serikat (2003),

d) *World Peace Prize Award,* dari World Peace prize Award Council (WPPAC) Seoul, Korea Selatan (2003),

e) *Paul Harris Fellow*, dari The Rotary Foundation of Rotary International (2000),

f) *Magsaysay Award,* Manila, Filipina (1993). Abdurrahman Wahid memperoleh penghargaan tersebut dinilai telah berhasil memainkan peran penting sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

integrator bangsa, membangkitkan semangat kerukunan antar umat beragama, dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap demokrasi.[17]

g) *Man of The year 1990* oleh almarhum majalah EDITOR.

h) Hal yang sama diberikan harian SURYA, Surabaya, yang memberi penghargaan sebagai *Tokoh Terpopuler*.

i) Dan oleh majalah Asiaweek, Abdurrahman Wahid juga dinobatkan sebagai 50 tokoh berpengaruh Asia, masing-masing pada urutan 24 (1996), 20 (1997), dan 23 (1999).[18]

Gus Dur juga banyak memperoleh gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dari berbagai lembaga pendidikan diantarannya ialah;

a) Doktor Kehormatan bidang Filsafat Hukum dari Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand (2000),

b) Doktor Kehormatan dari Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand (2000),

c) Doktor Kehormatan bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Universitas Sorbonne, Paris, Prancis (2000),

d) Doktor Kehormatan dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand (2000),

e) Doktor Kehormatan dari Universitas Twente, Belanda (2000),

---

[17] Ma'mun Murod Al-Brebesy. *Menyikapi* ..., 112.
[18] Umaruddin Masdar. *Membaca* ..., 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Doktor Kehormatan dari Universitas Jawaharlal Nehru, India (2000),

g) Doktor Kehormatan dari Universitas Soka Gakkai, Tokyo, Jepang (2002),

h) Doktor Kehormatan bidang Kemanusiaan dari Universitas Netanya, Israel (2003),

i) Doktor Kehormatan bidang Hukum dari Universitas Konkuk, Seoul, Korea Selatan (2003),

j) Doktor Kehormatan dari Universitas Sun Moon, Seoul, Korea Selatan (2003).

Abdurrahman Wahid juga merupakan penulis yang kreatif dia rajin menulis kolom di berbagai media massa dan juga membuat buku, Beberapa tulisannya sudah dibukukan antara lain;

a) *bunga rampai pesantren* (Dharma Bhakti, 1979),

b) *Muslim di Tengah Pergumulan* (Leppenas, 1981),

c) *Kiai Nyentrik Membela Pemerintah* (LkiS, 1997),

d) *Tabayyun Gusdur* (LkiS, 1998).[19]

e) "*Sosiologi Kyai*",

f) *Kiai mengugat Gus Dur menjawab, sebuah pergumulan wacana dan transformasi,* Jakarta: Fatma Press, 1989,

g) *Islam, Negara, Dan Demokrasi Himpunan Persikan Perenungan Gus Dur*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.

---

[19] *Ibid.* Hal 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) *Prisma Pemikiran Gus Dur, Yogyakarta:* LKiS, 1998.

i) *Tuhan Tidak Perlu Dibela,* Yogyakarta: LKiS, 1999. *Gus Dur Menjawab Tantangan Perubahan*, Jakarta: Kompas, 1999.

j) *Membangun Demokrasi*, Bandung: Rosda, 1999. *Mengurai Hubungan Agama dan Negara, Jakarta:* Grasindo, 1999. Dan *Melawan Melalui Lelucon,* Jakarta: Tempo, 2000.[20]

5. Pengaruh

Di dalam dunia pemikiran Indonesia, nama Abdurrahman Wahid telah malang melintang selama lebih dari dua dasawarsa. Selain karena pandangan-pandangan dan kiprahnya yang sering mengejutkan baik kawan maupun lawannya, juga karena kekuatannya untuk melampaui batas-batas cultural dan geografis di mana dia berasal.

sosok Abdurrahman Wahid adalah figur seorang ulama, cendekiawan muslim, intelektual moderat yang sekaligus sosialis, serta pejuang demokrasi. Pada saat yang sama Abdurrahman Wahid juga sosok pemimpin kharismatik namum demokratis serta ambivalen namun transformatif. Beliau adalah sosok pimpinan yang sangat kharismatik bagi warga NU khususnya dan umat muslim pada umumnya. pada saat yang sama ia mampu mentransformasikan mereka terbebas dari kungkungan tradisionalisme-feodalistik menuju menuju masyarakat yang progresif dan demokratis.

[20] Marzuki Wahid. *BEYOND* ..., 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdurrahman Wahid telah memberikan Kontribusinya yang cukup signifikan bagi diskursus intelektual Muslim di Indonesia secara umum, khususnya bagi berakhirnya dan tuntasnya hubungan Islam dan Negara (demokrasi) dan sikap saling curiga.

Posisi Abdurrahman Wahid yang meupakan keturunan darah biru dan posisi Abdurrahman Wahid yang pernah menjabat sebagai ketuab PBNU, mempunyai pengaruh yang cukup besar. Dalam pemikiran demokrasi Abdurrahman Wahid banyak mendorong tumbuhnya gairah baru di kalangan intelektual Indonesia, utamanya dari kalangan intelektual muda.

Ketika umat Muslim di dunia dicap sebagai kelompok ekstrimis oleh barat, Abdurrahman Wahid mampu mengetengahkan Indonesia salah satu negara Muslim terbesar di dunia yang dianggap toleran, pluralis dan cinta damai. Pada saat yang sama, beliau juga mampu mengajarkan kepada para pengikutnya mengenai cara menghadapi modernisasi ala barat melalui kombinasi nilai-nilai baru serta nilai-nilai lokal untuk membangun solidaritas baru. Dalam kepemimpinan, beliau selalu mensinergikan dua hal, yaitu nilai tradisional (yang biasanya dipertahankan oleh kaum tua) dengan nilai-nilai modern (yang biasanya didukung oleh kaum muda), sinergis ungkapan umum dala fiqih NU: "Mempertahankan nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdurrahman Wahid adalah figur yang gigih dalam membela dan memperjuangkan demokrasi, humanisme dan anti kekerasan. bekerja menjaga kebebasan manusia dengan melindungi kaum minoritas dan berbicara untuk yang tertindas. Salah satu contoh yakni mendobrak diskriminasi pada warga Tionghoa dan memberikan kebebasan beribadah kepada pemeluk Konghuchu yang pada zaman orde baru tidak mendapat kebebasan dari penguasa, di era Abdurrahman Wahid etnis ini di terima. Abdurrahman Wahid Mendorong kaum perempuan untuk bertindak, membela kaum lemah dan berjuang untuk perdamaian. Beliau membangun identitas nasional dengan menjalin solidaritas di antara berbagai golongan yang berbeda.

B. Paradigma Pemikiran

Seperti tradisi kaum intelektual Sunni tradisional pada umumnya, Abdurrahman Wahid membangun pemikirannya melalui paradigma kontekstualisasi khazanah pemikiran Sunni klasik. Greg Barton mengemukakan bahwa Abdurrahman Wahid merupakan seorang intelektual yang mewakili perpaduan (sintesis) dua tradisi, kesarjanaan Islam tradisional dan pendidikan barat modern. Menurutnya, salah satu hasil sintesis itu adalah perhatiannya yang kuat untuk reformasi pemikiran dan praktik Islam.[21]

---

[21] Abdul Ghofur, *Demokratisasi Dan Prospek Hokum Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Gus Dur)*. Yogyakarta, Walisongo Perss dan Pustaka Pelajar, 2002. Hal 77-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Greg Barton, Fachry Ali dan Bachtiar Effendi memasukkan Abdurrahman Wahid dalam kategori Neo-modeernisme Islam. Ada lima ciri yang menonjol dalam pandangan Barton dari aliran neo-modernis. *Pertama,* neo-modernis adalah gerakan pemikiran progresif yang mempunyai sikap positif terhadap modernitas, perubahan dan pembangunan, dan tidak tertutup kemungkinan untuk bersikap kritis terhadap pembangunan tersebut. *Kedua,* neo-modernisme tidak melihat barat sebagai ancaman atas Islam dan umatnya. Peradaban barat dan Islam saling mengisi. Tidak hanya Dalam konteks pembelaan ide liberal barat seperti demokrasi dan hak-hak asasi manusia, tetapi juga mengajukan argumentasi bahwa Islam mempunyai kepedulain yang sama dengan barat tentang hal ini. *Ketiga,* neo-modernisme Islam mengafirmasi semangat "sekularisasi" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai salah satu upaya membangun titik temu antara Islam dan Negara. *Keempat,* neo-modernisme sangat mengedepankan pemahaman Islam yang terbuka, inklusif dan liberal, utamannya dalam menerima dan mengafirmasi pluralisme masyarakat dan menekankan signifikansi toleransi dan harmoni dalam hubungan antar komunal. *Kelima,* neo-modernisme banyak mewarisi semangat Muhammad Abduh dalam rasionalisme ijtihad secara kontekstual.[22]

Melihat keadaan umat Islam di Indonesia, terdapat suatu keprihatinan pada diri Abdurrahman Wahid karena umat Islam belum dapat menempatkan diri pada arus perubahan yang sedang dihadapi akibat modernisasi. Pesantren mislanya, masih

[22] Umaruddin Masdar. *Membaca* ..., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadapi masalah kepercayaan yang berlebihan terhadap pemimpin yang kharismatik dan tenggelam dengan komunitasnya sendiri. Sikap semacam ini bukan saja khas dunia pesantren atau Islam tradisional, tetapi Islam Indonesia pada umumnya,termasuk kalangan modernis.

Karena itu Abdurrahman Wahid melihat bahwa solusi terbaik adalah merumuskan sebuah sintesa bagi umat Islam, agar dapat relevan dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu pemahaman Islampun harus dibangun dalam kerangka pluralistic mencakup bidang social yang luas, termasuk politik. Salah satunya adalah menolak kecenderungan munculnya organisasi yang eksklusif dan sektarian. Sementara itu menurut AS Hikam, pola pemikiran Abdurrahman Wahid pada dasarnya dapat dipahami sebagai produk dari tiga kepedulain utama: *pertama,* revitalisasi warisan Islam tradisional *ahlussunah wal jama'ah. Kedua,* keterlibatan dalam wacana dan kiprah modernitas. *Ketiga,* pencarian jawaban atas persoalan konkrit yang dihadapi umat Islam di Indonesia.[23]

Dengan demikian dapat diketahui bahwa corak utama pemikiran Abdurrahman Wahid lebih menekankan pada pendekatan kontekstual daripada tekstual dan mencoba memadukan pemikiran khasanah pemikiran Islam tradisional dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat modern.[24] Abdurrahman wahid, dalam konteks ini, tidak sekedar menggunakan produk-produk pemikiran Islam tradisional, tetapi lebih menekankan pada penggunaan metodologi (*manhaj*) teori hukum (*ushul al-fiqh*) dan kaidah-kaidah

---

[23] Gus Dur. Diantara keberhasilan dan kenestapaan. (Jakarta; Rajawali Pers, 1999) Hal 77.
[24] Abdul Ghofur, *Demokratisasi* ..., 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum (*qawaid fiqhiyyah*) dalam kerangka pembuatan suatu sintesis untuk melahirkan gagasan baru sebagai upaya menjawab perubahan-perubahan aktual.[25]

Hal ini tidak terlepas dari latar belakang keluarga Abdurrahman Wahid yang merupakan keluarga santri Sunni, Abdurrahman Wahid lahir dan dibesarkan di lingkungan yang sarat dengan kultur *Sunni,* yaitu NU. Sebagai seorang cendekiawan yang berlatar belakang Muslim tradisional, pemikiran Abdurrahman Wahid dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang berkembang di kalangan Nahdhatul Ulama (NU). Sebagai *jam'iyyah Diniyyah,* NU sarat dan dekat dengan pemikiran paham Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah (Sunni).[26] Corak utama pemikiran Sunni sendiri yaitu pendekatannya yang kontekstual, dan mencoba memadukan khasanah pemikiran Islam tradisional dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat modern.

Abdurrahman wahid berusaha membangun sejarah pemikiran sebagai suatu *continnum* dari sejarah intelektual sebelumnya. Kontinuitas peradaban atau sejarah pemikiran itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kecuali kalau seorang intelektual hanya ingin membangun sebuah bangunan pemikiran yang bersifat kasuistik dan temporal.

Tantangan kehidupan modern, di satu sisi, menuntut kemampuan intelektual untuk merespon secara positif dan kreatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi tanpa harus melepaskan diri dari substansi dan prinsip-prinsip universal agama. Pluralitas

---

[25] Umaruddin Masdar. *Membaca* ..., 122-123.
[26] Pahrurroji M. Bukhori. *Membebaskan Agama dari Negara.* (Bantul; Pondok Edukasi, 2003), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Indonesia, di sisi lain juga menuntut sikap keberagaman yang inklusif dan toleran. Dengan menggunakan paradigma kontekstualisasi pemikiran klasik, sikap-sikap itu yaitu respon positif dan kreatif terhadap perubahan dan sikap keberagaman yang inklusif dan toleran bisa diekspresikan secara nyata oleh Abdurrahman wahid. Perpaduan antara aplikasi (metodologi) pemikiran Islam tradisional dan pemikiran Islam modern melalui suatu proses ijtihad kreatif akan menghasilkan konstruk pemikiran yang lebih inklusif, rasional, responsif dan mapan. Corak pemikiran Abdurrahman Wahid yang liberal dan inklusif secara nyata sangat dipengaruhi oleh penelitiannya yang panjang terhadap berbagai khazanah pemikiran Islam tradisional yang kemudian menghasilkan reinterpretasi dan kontekstualisasi, termasuk terhadap pemikiran hukum Islam.

Berangkat dari paradigma kontekstualisasi pemikiran fiqh yang dielaborasi dari teori *ushul fiqh dan qawaid fiqh,* Abdurrahman Wahid kemudian secara tegas dan siap memperlihatkan perhatiannya yang tinggi terhadap perubahan dan persoalan-persoalan masyarakat modern salah satunya yakni tentang demokrasi. Gagasan demokrasi Abdurrahman Wahid bukan merupakan suatu yang dibangun atas kelatahan dan apologi intelektual belaka, namun merupakan suatu yang dengan mudah dapat dirunut metodologinya dalam teori-teori dan kaidah fiqh.

Paradigma pemikiran Abdurrahman Wahid ini secara substantif mendekati paradigma pemikirana Muhammad Abduh dalam menangkap esensi Islam yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendahulukan kemaslahatan atau kebutuhan actual masyarakat. Dalam konteks ini Abdurrahman Wahid sepakat dengan aksioma bahwa Islam adalah agama pembebasan. Konteks kesejarahan Islam menunjukkan bahwa agama ini lahir sebagai sebuah protes terhadap ketidakadilan.

Dalam sebuah Negara pluralistic, menjadikan Islam, atau agama apapun, sebagai ideologi Negara hanya akan memicu disintegrasi yang berbasis pada sektarianisme. Negara seperti Indonesia tidak mungkin memberlakukan nilai-nilai yang tidak diterima oleh semua warga Negara, yang berasal dari agama, dan pandangan hidup yang berlainan. Dan pada dasarnya pluralistic Negara merupakan hukum alam *sunnatullah*, menurut Abdurrahman Wahid Islam seharusnya diimplementasikan sebagai sebuah etika social yang berarti Islam berfungsi komplementer dalam kehidupan Negara. Memaksakan Islam pada fungsi suplementer dalam Negara hanya akan menjadikan Islam tercabut dari nilai-nilai fundamentalnya yang kondusif bagi tegaknnya keadilan, egalitarianisme dan demokrasi.

Disinilah tampak bahwa pendekatan serba fiqh merupakan kata kunci dari pemikiran Abdurrahman Wahid. Fiqh bagi Abdurrahman Wahid merupakan proses pengembangan yang berlaku secara bertahap (*gradual*). Fiqh bagi Abdurrahman Wahid merupakan proses penggembangan yang berlaku secara bertahap. Karenanya menurut Abdurrahman Wahid dibutuhkan adanya suatu refleksi atau penggembangan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifatnya terus-menerus dan berkesinambungan, yaitu pengembangan sebuah gugusan hukum agama yang selalu dinmais.[27]

Pemikiran yang serba fiqh ini, menunjukkan sikap moderat Abdurrahman Wahid, terlebih dalam menyingkapi berbagai kecenderungan social dan politik yang berkembang secara dinamis di masyarakat. Greg Barton menilai bahwa pemikiran Abdurrahman Wahid cukup kohern dan sempurna untuk disebut sebagai sebuah aliran pemikiran yang berdiri sendiri. Barton menyebut Abdurrahman Wahid sebagai pemikir neo modernis yang salah satu cirinya adalah komitmennya pada pluralisme dan nilai-nilai inti demokrasi.

C. Pribumisasi Islam

1. Menimbang Pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid

Salah satu pokok pikiran Gus Dur yang sebenarnya agak unik dan menjadi gagasan penting Gus Dur di era tahun 80-an, yaitu gagasan tentang pribumisasi Islam. Gagasan ini sebenarnya tidak kalah kontroversialnya dibandingkan gagasan Gus Dur yang lain. Hal ini karena gagasan Pribumisasi Islam sepertinya berhadap-hadapan langsung dengan semangat puritanisasi Islam yang juga mengemuka di awal 80-an.

Gagasan pribumisasi Islam merupakan gagasan yang genit bagi para pemikir Islam kultural, transformati dan liberal, menjadi menarik karena memicu semangat untuk senantiasa mengisi ruang kebudayaan dengan beragam eksperimentasi

[27] Ma'mun Murod Al-Brebesy. *Menyingkapi* ..., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asimilasi dan akulturasi Islam dengan kebudayaan lokal. Ini akan membuat proses Islamisasi sebagai sebuah proses yang tidak pernah final dan masih selalu dalam situasi negosiasi.

Namun gagasan ini juga menjadi pemikiran yang dianggap 'musuh besar' oleh para penganut Islam puritan, fundamentalis dan para penganjur penegakan syariat Islam secara formal. Karena tentu, pribumisasi Islam akan lebih akomodatif terhadap beragam kebiasaan lokal yang berbau bid'ah dan ditenggarai akan menggiring umat dalam kondisi mencampur-aduk segala yang haq dan yang bathil.

Padahal kalau diperhatikan dengan seksama, konsepsi Pribumisasi Islam versi Gus Dur akan menyelamatkan umat dari keterpecahan. Pribumisasi menjadi ruang dialog agama dan budaya dalam posisi setara, serta berusaha mengawinkan dengan menjembatani jurang pemisah yang selama ini membuat agama dan budaya terpisah jauh. Dengan demikian tidak ada lagi pertentangan antara agama dan budaya, bahkan saling memperkaya.

Oleh karena itu tidak bisa serta merta dikatakan bahwa pribumisasi Islam akan menghasilkan Islam yang tidak otentik, karena otentisitas keberagamaan merupakan prerogatif hak Tuhan. Islam Indonesia juga berhak mengklaim otentik sebagaimana otentiknya Islam Arab atau Timur Tengah. Bahkan Islam Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin saja bisa lebih kaya karena sarat dengan nilai-nilai luhur budaya lokal yang penuh kearifan, santun dan toleran.[28]

Secara riil, membedakan nilai-nilai agama (Islam) dan budaya bukanlah persoalan mudah dalam kehidupan manusia apalagi di Indonesia. Realitas ini dipahami bahwa kehidupan manusia yang dinamis menyisakan keragaman budaya di berbagai daerah dan Islam dalam konteks ini memiliki keragaman ekspresi sesuai dengan kecenderungan penganutnya dalam memahami teks-teks agama.

Islam dipahami bersumber dari al-Qur'an dan Hadith. Karenanya, nilai-nilai normatif yang dikandungnya tidak dapat dipisahkan, maka kecenderungan yang dimiliki adalah bersifat permanen secara tekstual. Sementara budaya merupakan hasil karsa manusia, ketika diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan sifatnya, maka budaya berpotensi berubah bergantung dengan perkembangan dan perubahan waktu. Titik pijak yang berbeda tidak menghalangi kemungkinan terjadinya manifestasi kehidupan beragama dalam budaya, misalnya budaya menghormati Kiai, cara hidup santri, perayaan mauled nabi dan lain-lain.

Dilematisasi yang ada dalam Islam dan budaya pada tahapan praksis mempengaruhi sikap pemeluk agama dalam mengambil keputusan. Abdurrahman Wahid menjelaskan bahwa watak dasar ini sebenarnya merupakan persoalan yang telah lama dihadapi umat Islam dewasa ini dan bahkan sebenarnya sejak dahulu,

---

[28] http://www.kasmanku.co.cc/2010/01/menimbang-pribumisasi-islam-ala-gus-dur.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kehidupan manusia yang dinamis dengan keragaman budayanya dihadapkan dengan noram-norma Islam yang permanen dan normatif. [29]

Upaya memahami agama tanpa melihat social-budaya sebagai bagiannya, merupakan bentuk pengibirian, jika tidak mengatakan pemaksaan, atas teks-teks agama, ketika ditafsirkan pada realitas yang berbeda. Penafsiran agama sering kali kurang mengindahkan keragaman budaya local dan kearifan Islam sebagai agama penebar *rahmah* semakin jauh dari kenyataan hidup manusia yang senantiasa multicultural sebab nyatanya budaya akan mengalami proses ketergerusan bila tafsir agama kurang mempertimbangkan realitas kemanusiaannya, khususnya yang berhubungan dengan nilai-nilai local.

Dalam menyikapi persoalan tersebut, dalam memahami Islam, Abdurrahman Wahid lebih mendekati pada pandangan bahwa sumber-sumber tekstual harus dimaknai dengan mendalam dan kontekstual, yaitu upaya pemahaman pada teks-teks keagamaan dengan menempatkan substansinya sebagai nilai dasar bukan memaknainya dengan cara harfiyah. Titik temu yang dialogis antara agama dan keragaman budaya di Indonensia berorientasi pada pemenuhan nilai-nilai universal itu dalam kehidupan masyarakat yang beragam budaya, suku, etnis maupun agama. Tidak menggunakan pandangan tekstual secara harfiah tanpa melihat kondisi budaya local yang ada.

---

[29] Wasid. *Gus Dur Sang Guru Bangsa "pergolakan Islam, kemanusiaan dan kebangsaan"*. (Yogyakarta; Interpena, 2010), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama dan budaya akan terus menerus mengalami tumpang tindih dan ini merupakan sebuah proses yang akan memperkaya kehidupan, membuatnya tidak gersang dan kehidupan lebih bermakna dengan tidak adanya kenyataan yang stagnan serta jumud. Kekayaan yang ada dengan variasi budayanya akan memungkinkan dapat menumbuhkan persambungan dan komunikasi humanis antara berbagai kelompok atas dasar persamaan-persamaan, baik perrsamaan agama maupun persamaan budaya. Karenanya, upaya penyeregaman merupakan tindakan yang tidak manusiawi, bahkan menyalahi sunnatullah, sebab perbedaan merupakan sebuah kenyataan hidup agar manusia saling mengenal atas dasar agama, bangsa dan budayanya.

2. Akar Pribumisasi

Ketika pertama kali melemparkan gagasan pribumisasi Islam di tahun 80an, sebenarnya Gus Dur menggunakan istilah ini untuk mengganti istilah indigenization yang telah lebih dulu digunakan oleh intelektual muslim di Indonesia. Tapi perlu digaris bawahi bahwa Gus Dur tidak benar-benar hanya mengganti istilah, dalam pribumisasi Islamnya, Gus Dur punya tujuan sendiri, "mengokohkan kembali akar budaya kita, dengan tetap berusaha menciptakan masyarakat yang taat beragama. (2001:117-136)."

Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Baso (2002:8-9), Gus Dur kurang sepakat dengan orentasi pembaruan islam dengan budaya atau upaya formalisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran Islam dalam kehidupan budaya karena semua itu berupaya menjadikan Islam sebagai tolak ukur ideal untuk menilai manifestasi budaya pada umumnya, yang menampilkan budaya ideal, yang terlepas dari akar-akar budaya lokal.

Secara sederhana, Gus Dur merasa gerah dengan proses Arabisasi budaya yang terjadi dengan mendompleng pada gerakan purifikasi islam. Maka Gus Dur sempat melemparkan usulan untuk mengganti "assalamu alaikum" dengan "selamat pagi" untuk mengungkapkan ketidak sepakatannya atas penggatian "saudara-saudari" dengan "akhi-ukhti" dan lain sebagainya.

Sebagai gantinya, Gus Dur menawarkan pilihan lain, yaitu keterbukaan antar budaya sebagai bagian pribumisasi Islam, "antara Islam dan paham pemikiran lain atau budaya lain berlangsung proses saling mengambil dan saling belajar. Konsekuensi logis dari keterbukaan seperti itu adalah keharusan untuk mendudukkan Islam hanya sebagai faktor penghubung antara berbagai budaya lokal dan melayani semua budaya lokal itu (akan) menumbuhkan universalitas pandangan baru tanpa tercabut dari akar kesejarahan masing-masing.[30]

Dari pemahaman ini, pribumisasi Islam muncul sebagai sebuah konsep yang dikembangkan oleh Abdurrahman wahid, tentang upaya membumikan ajaran-ajaran Islam dengan menempatkan budaya local sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam memaknainya, untuk tidak mengatakan dipertentangkan. Pribumisasi

[30] http://www.kasmanku...., .html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindarkan bentuk polarisasi antara agama dengan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan.

Pada awalnya Abdurrahman wahid dalam melontarkan gagasan mengenai pribumisasi Islam, berusaha untuk membumikan ajaran-ajaran Islam dalam konteks keIndonesiaan. Membumikan Islam berarti berusaha untuk menemukan formula Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia. Dengan kata lain, bagaimana menemukan format nilai-nilai Islam yang berguna bagi kehidupan bangsa ini. Abdurrahman Wahid berusaha untuk menjabarkan Islam yang membumi itu dalam berbagai macam konteks dan kasus. Menurutnya juga, upaya pribumisasi adalah manifestasi kehidupan Islam belaka, bukan ajaran yang memiliki kesinambungan dengan inti keimanan dan peribadatan formalnya. Tidak diperlukan 'Qur'an Batak' dan Hadith Jawa. Islam tetap Islam dimana saja berada.

Bagi Abdurrahman Wahid, pribumisasi Islam berarti upaya pencarian Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia, yaitu Indonesia yang dihuni oleh beragam suku agama dan budaya. Indonesia yang telah memiliki ideologinya sendiri yaitu Pancasila. Dengan kata lain, Indoensia adalah sebuah entitas dan Islam juga sebuah entitas. Dan kedua entitas itu dipadukan sehingga bersimbiosis secara mutualistis. Dari sinilah kemudian Abdurrahman Wahid menekankan pentinggnya keterbukaan beragama. Sebuah inklusivitas yang bersifat universal. Bagi Abdurrahman Wahid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam mengajarkan keterbukaan dan kebebasan, termasuk memberikan kebebasan kepada orang yang bukan Islam sekalipun.[31]

Penegasan Islam pada proporsinya hanya berlaku pada sifat-sifat aslinya, sehingga upaya rekonsiliasi antara agama dan budaya adalah mencari pemaknaan teks-teks agama dengan mempertimbangkan factor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilan. Dalam proses ini, pembauran Islam dengan budaya tidak boleh terjadi sebab mengantarkan pada hilangnya sifat-sifat keaslian. Islam harus tetap pada sifatnya.

Gagasan pribumisasi Islam sendiri muncul sebagai jawaban atas problema yang dihadapi umat Islam sepanjang sejarahnya, yakni bagaimana mempertemukan budaya dengan norma, sebagaimana juga menjadi persoalan dalam *ushul al-fiqh.* Tumpang tindih antara agama dan budaya akan terus terjadi sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang.

Dengan demikian pribumisasi Islam menurut Abdurrahman Wahid adalah suatu pemahaman Islam yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan local di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa merubah hukum itu sendiri. Pribumisasi Islam bukan suatu upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nash, dengan tetap memberikan peranan kepada *ushul al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqh.* Dalam proses

[31] Abd. Rahim. *Gus Dur dalam sorotan cendekiawan Muhammadiyah*. (Bandung; Mizan), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, pembauran Islam dengan budaya menurut Abdurrahman wahid tidak boleh terjadi, sebab berbaur berarti hilangnya sifat-sifat asli. Islam harus tetap pada sifat keislamannya. Misal al Qur'an harus tetap menggunakan bahasa arab, terutama shalat, sebab hal ini telah menjadi norma.[32]

Memahami agama dengan tidak merusak lokalitas, menjadi penting untuk diwujudkan, karena lokalitas budaya itu adalah sebuah kebiasaan yang telah lama berkembang dan telah menjadi sebuah system nilai dalam praktek kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia. Nilai-nilai local telah menjadi sebuah system kehidupan. Keberadaanya selalu menyertai kehidupan masyarakat tertentu di berbagai daerah.

Abdurrahman wahid bukanlah orang pertama yang memulai gagasan pribumisasi Islam. Ia adalah generasi pelanjut dari langkah strategis yang pernah dijalankan walisongo. Dengan langkah pribumisasi Islam walisongo berhasil mengislamkan tanah Jawa tanpa harus berhadapan dan mengalami ketegangan dengan budaya setempat. Para *wali songo* lebih mengedepankan pemaknaan Islam sebagai system moral bagi kehidupan dari pada upaya Islamisasi total, yang Nampak, misalnya penggunaan wayang atau bahasa jawa sebagai media dakwah.

Kemudian Upaya rekonsiliasi atau akomodasi budaya dan agama mengenai Raggon atau atap yang berlapis pada masjid demak tersebut diambilkan dari konsep 'Meru' dari masa pra Islam (Hindu-Budha) yang terdiri dari Sembilan susun. Sunan

[32] Marzuki Wahid. *BEYOND* ..., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalijaga memotongnya menjadi tiga susun saja, yang melambangkan tiga tahap keberagaman seorang muslim, *iman*, *Islam*, dan *ihsan*.

3. Peng-Islaman Tanpa Menjadi Arab

Secara sederhana, wacana pribumisasi Islam ala Gus Dur dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi proses asimilasi dan akulturalisasi nilai-nilai Islam dengan kebudayaan lokal Indonesia yang berlangsung secara alamiah. Upaya ini dlakukan dengan mengemas proses yang alamiah ke dalam tataran "konsep" agar tradisi-tradisi yang terbentuk dari proses asimilasi dan akulturasi ini tetap dapat diakui sebagai budaya Islami.

Pribumisasi Islam menjadi penting dalam konteks lokal ini untuk dilakukan, karena membuak ruang apresiasi yang luas bagi kaum Muslim di Indonesia agar pada saat yang sama tetap mempertahankan identitas ke-Indonesia-annya yang khas dan sekaligus mengejawantahkan nilai-nilai Islam dalam praktik kehidupan sehari-harinya. Jadi umat Islam Indonesia tetap dapat menjadi islami tanpa harus kehilangan keIndonesiaannya.

Bagi seorang Gus Dur, untuk menjadi seorang Muslim Indonesia yang baik, maka orang tersebut tidak harus menjadi orang Arab. Jadi pribumisasi Islam akan memunculkan wajah Islam yang khas Nusantara tanpa harus dipengaruhi oleh model Islam Timur Tengah, Islam Afrika Utara, Islam Persia dan berbagai corak Islam lainnnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atau dengan meminjam penjelasan Nurcholish Madjid (1997: 93-94) dapat dikatakan bahwa pribumisasi Islam akan menampilkan Islam dengan format dan cita yang sedikit berbeda dengan penampilan Islam di kawasan lingkungan peradaban besar Arab (Arabo-Islamic Civilization) yang terbentang dari Bahrain sampai Maroko maupun dengan Islam di kawasan lingkungan peradaban besar Persia (Persian-Islamic Civilization) yang meliputi kawasan Islam Asia Daratan mulai Bangladesh sampai Turki, hingga Eropa Timur, seperti Bosnia, Macedonia, Chechnya, dan Albania.

Islam Indonesia akan berkarakter khas yang dalam bahasa Nurcholish Madjid, Archipelagic Islam (Islam Kepulauan) yang ditunjukkan dengan model keberislaman yang begitu kaya dengan berbagai macam citarasa peradaban yang pernah muncul di dunia, kaya dengan khasanah kebudayaan, serta tingkat toleransi antar umat beragama yang sangat tinggi.

Gus Dur (dalam Islam Pribumi, 2003) juga dengan tegas mengatakan bahwa arabisasi atau proses pengidentifikasian diri dengan budaya timur tengah adalah tercabutnya dari akar budaya kita sendiri. Lebih dari itu, arabisasi belum tentu cocok dengan kebutuhan. Ini berarti bahwa proses pribumisasi memang mencoba memberi ruang bagi tafsir Islam yang pas dengan kebudayaan dan tradisi lokal.[33]

---

[33] http://www.kasmanku...., .html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdurrahman wahid menegaskan bahwa proses arabisasi, lawan dari pribumisasi, melalui penempatan interpretasi agama serta kerangka budaya arabnya dalam realitas kehidupan di Indonesia yang multi cultural akan mengancam keaslian budaya yang dimilikinya. Proses arabisasi menjadi sebab keterserabutan umat Islam dari akar budaya lokalnya sendiri.[34] Kecenderungan merubah symbol-simbol lokal dengan hal-hal yang berbau arab, akan menjauhkan agama, dalam hal ini Islam, dengan kehidupan masyarakat yang memiliki karakter local, padahal tahapan substansinya ada kesamaan nilai yang dimiliki antara arab dengan yang local, misalnya kata shalat dan sembahyang.

Mempertahankan logika simbolik arab, tanpa menilik substansinya hubungan bahasa agama dan lokalitas akan menjaukan diri dari misi umum Islam sebagai agama *rahmah li al-alamin.* Oleh sebab itu bahwa pribumisasi Islam yang diinginkan gus dur adalah upaya mendialogkan agama dengan tradisi local sekaligus menemukan kekhasan nilai-nilai Islam substansial. Pribumisasi Islam adalah bagian dari karakter Islam Indonesia yang berbeda performa dengan Islam arab sebab keduanya memiliki nilai-nilai local yang tidak bisa dipisahkan, hanya spirit umum agamalah yang dapat mempertemukan, yaitu bahwa Islam memiliki dimensi spiritualitas sekaligus dimensi kemanusiaan.[35]

---

[34] Wasid. *Gus Dur* ..., 113.
[35] *Ibid.*, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gagasan pribumisasi Islam dan implementasi Islam sebagai etika social dalam kehidupan Negara pluralistic jelas mengandung implikasi bahwa dalam konteks demokrasi Islam tidak ditempatkan sebagai ideologi alternative seperti syariat dalam posisi berhadapan dengan kedaulatan rakyat. Kontribusi Islam terhadap demokrasi bisa dicapai bila dari ajaran Islam ditarik sejumlah prinsip universalnya seperti persamaa, keadilan, musyawarah, kebebasan, dan rule of law.[36]

D. Agama dan Demokrasi

1. Korelasi antara Islam dan demokrasi

Bagi kalangan neo-modernis Islam, demokrasi dan agama sesungguhnya dapat dipertemukan. Demokrasi dipandang sebagai aturan politik yang paling layak, sementara agama diposisikan sebagai wasit moral dalam pengaplikasian demokrasi. Memang antara Islam dan demokrasi mempunyai basis empiris yang berbeda, namun mempunyai kandungan etis yang sama. Meskipun pada realitas empiris sering menunjukkan kebalikan, bahkan bertentangan.[37] Dalam prakteknya antara agama dan demokrasi mempunyai hubungan simbolis mutualis (saling mengguntungkan), yakni agama mendukung demokrasi sebagai system yang terbuka berdasarkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam agama tersebut dan demokrasi memberi peluang bagi proses pendewasaan kehidupan beragama.

---

[36] Umaruddin Masdar. *Membaca* ..., 147.

[37] Tobroni dan Syamsul Arifin. *Islam Pluralisme Budaya dan politik; reflektif teologi dalam keberagaman dan pendidikan.* (Yogyakarta; Sipres, cet I), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abdurrahman Wahid paham demokrasi memiliki kesamaan yang kuat dengan misi agama. Sebab agama pada dasarnya adalah juga untuk meneggakan keadilan bagi kesejahteraan rakyat. Namun agama dapat berjalan seiring dengan demokrasi manakala ia telah melakukan transformasi bagi dirinya, secara intern maupun ekstern.[38] Oleh sebab itu, menurut Abdurrahman Wahid untuk dapat melakukan transformasi intern itu agama harus merumuskan kembali pandangan-pandangannya mengenai martabat manusia, kesejajaran kedudukan semua manusia di muka undang-undang, dan solidaritas hakiki antar sesama umat manusia.

Agama menurutnya akan dapat selaras dengan demokrasi jika memiliki watak membebaskan. Islam hadir ke dunia untuk membebaskan manusia dari belenggu "Jahiliyah". Islam memberi kebebasan kepada umatnya untuk berkreasi menciptakan peradaban yang lebih manusiawi. Agama apapun sama-sama mengemban misi perbaikan kehidupan umat manusia melalui perubahan struktur masyarakat. Dengan tegas Al-Qur'an menegaskan bahwa Muhammad diutus ke muka bumi untuk memberi rahmat bagi seluruh alam. Membangun kesejahteraan semesta, bukan menindas bangsa-bangsa. Titik temu antara agama dan demokrasi inilah yang menurut Gus Dur harus dikedepankan dalam membangan Indonesia masa mendatang. potensi nalar agama akan sanggup menopang perjuangan

---

[38] Drs. Ahmad Amir Aziz, M.Ag. *Neo-Modernisme Islam di Indonesia (gagasan sentral nurcholish madjid dan Abdurrahman wahid)*. Jakarta, Rineka Cipta, 1999, 65-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penegakan demokrasi di Nusantara. Sehingga pada gilirannya proses demokratisasi tidak akan kehilangan ruh ketuhanannya. Tidak terjebak dalam budaya menyimpang semacam hedonisme dan metrealisme.

Sepak terjang Abdurrahman Wahid ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh pemikiran "*Liar*"-nya yang selalu mengedepankan nilai-nilai inklusifme, selalu berusaha untuk mengambil "*jalan tengah*" (moderat). Seperti yang sudah dipaparkan diatas, demokrasi merupakan salah satu tema besar dalam pemikiran Abdurrahman Wahid. Penerimaan konsep demokrasi adalah pilihan logis yang bagi Abdurrahman Wahid dianggapnya sebagai salah satu dimensi dalam ajaran Islam.

Ada beberapa alasan mengapa Islam disebut sebagai agama demokrasi: *pertama,* Islam adalah agama Hukum, dengan pengertian hukum ini berlaku bagi siapapun tanpa memandang kelas atau jabatan semua dikenakan hukum yang sama. *Kedua,* Islam memiliki asas permusyawaratan. Artinya perkara-perkara mereka dibicarakan diantara mereka. Dengan demikian tradisi membahas, tradisi bersama-sama mengajukan pemikiran secara bebas dan terbuka pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan. *Ketiga,* Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan. Hal ini sebenarnya adalah prinsip demokrasi, karena demokrasi pada dasarnya adalah upaya bersama-sama untuk memperbaiki kehidupan. Karena itulah Islam dikatakan sebagai agama perbaikan, *diinul islah,* atau agama inovasi.[39] Dan

[39] Abdurrahman Wahid. *Islam, Negara dan Demokrasi (Himpunan percikan peremungan Gus dur).* Jakarta, Erlangga, 1999, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keempat, sebagaimana demokrasi, Islam *das sollen* juga mengedepankan dan menopang prinsip-prinsp keadilan.[40]

Agama dalam perspektif yang demikian merupakan sumber nilai bagi penegakkan demokrasi. Artinya demokrasi adalah implementasi dari ajaran agama tanpa harus menyebutkan formulasinya dalam formalisasi agama. Meminjam terminology Kuntowijoyo, demokrasi adalah obyektivikasi ajaran agama. Hal ini sangat mudah ditemukkan bentuk-bentuk keterkaitannya. Misal, menurut Abdurrahman Wahid prinsip penegakan keadillan sebagai upaya mengembanggkan demokrasi. Demokrasi hanya dapat diteggakan ketika keadilan dijalankan oleh siapapun yang berkuasa dan bentuk Negara apapun.[41]

Dalam buku membaca pikiran Gus dur dan Amien Rais, dijelaskan Bahwa demokrasi menurut Abdurrahman Wahid tidak hanya suatu system yang menjamin kebebasan advokasi saja, namun memiliki nuansa etis yang mampu melahirkan keadilan tanpa kekerasan. Terjadinya kombinasi itegralistik dari berbagai etnis, budaya, rasionalitas, dan kekuatan kultur adalah penting. Demokrasi seperti iilah oleh Abdurrahman Wahid dinamakan demokrasi model Indonesia atau demokrasi kultur. Suatu system demokrasi yang telah mengalami "pribumisasi" dengan kultur Indonesia. Demokrasi jenis inilah yang belum dimiliki bangsa kita saat ini.

---

[40] Ma'mun Murod Al-Brebesy. *Menyingkapi* ..., 184.
[41] Listiono Santoso. *Teologi* ..., 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi Abdurrahman Wahid, ajaran demokrasi dapat diambil dari mana saja selama hal itu merupakan pencerminan dari teologi yang benar dan ketaatan yang saleh. Soal nilai kepercayaan masing-masing bukanlah menjadi persoalan berkenaan dengan keabsahan demokrasi. Sebab dalam pandangan Abdurrahman Wahid hanya dengan beginilah pengikut semua agama akan mampu memperjuangkan proses demokratisasi secara bersama-sama.

Dalam bukunya "*membangun demokrasi*" Abdurrahman Wahid berkata '*kalau untuk proses demokratisasi saja prinsip-prinsip tersebut dipertahankan, maka terhadap hal yang sama juga saya lakukan atas berlakunay keadilan. Berlangsungnya hak-hak yang sama di atas undang-undang dan persamaan kepentingan bagi semua warga Negara, tanpa kecuali ini berarti kebebasan untuk berbicara haruslah dipertahankan dan kebebsan berpendapat harus dijaga.*'[42] Dengan demikian Islam selalu menghendaki demokrasi yang merupakan salah satu ciri atau jati diri Islam sebagai agama hukum, maka Islam harus menggembangkan keadilan sosial di samping keadilan-keadilan lainnya. Jadi keadilan tidak selalu dihubungkan secara langsung dengan hukum, dengan kata lain keadilan bukanlah konsep hukum.

Perspektif demokrasi tanpa dipengaruhi oleh sekat-sekat agama, bagi Abdurrahman Wahid adalah sebagai bagian dari upaya mencari bentuk kenegaraan yang pasti akan memberikan tempat kepada agama, tetapi tidak dengan jalan

[42] Abdurrahman Wahid. *Membangun Demokrasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mematikan yang lain. Penegakan demokrasi kalau hanya bersandarkan pada kepentingan kelompok atau agama tertentu, justru mengakibatkan terjadinya polarisasi dalam masyarakat. Polarisasi tersebut bisa mengakibatkan keterpurukan Negara ini ke dalam konflik-konflik yang tidak berkesudahan.

Tanpa formalisasi agama pun, demokratisasi sesungguhnya merupakan bagian integral dari nilai-nilai agama. Proses demokratisasi bagi Abdurrahman Wahid merupakan jaminan perlindungan dari Islam sebagai agama mayoritas, baik kepada kaum sekuler yang menolak penggagamaan Negara maupun kepada kelompok agama lain yang selama ini ngeri melihat kekuatan Islam. Prinsip penegakan demokrasi terletak pada pengakuan atas berbagai perbedaan yang bersemayam dalam kehidupan yang disertai dengan pilihan untuk menerima dan menyampaikan secara sadar.

Abdurrahman Wahid mengkhawatirkan kalau Islam ditempatkan sebagai satu-satunya alternatif justru akan kehilangan relevansinya. Kalau Islam di Indonesia mau benar, maka lihatlah Islam hanya sebagai pemberi warna, tempatkanlah Islam sebagai jantung dan urat nadi dari segala persoalan, tidak lebih dari itu. Jika Islam difungsikan sebagai kebenaran tunggal, sedang yang lain harus mengalah, maka Islam hanya akan menjadi agama eksklusif. Hal ini pula akan menggangu terciptannya toleransi antar umat beragama dalam artian sesungguhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan sinyalemen Abdurrahman Wahid ini semestinya tidak ditangkap bukan hanya bagi umat Islam saja, tapi juga bagi umat-umat agama lainnya. Artinya ketika semua umat beragama sama-sama menginginkan terciptanya toleransi antar umat beragama, maka masing-masing agama tidak seharusnya menampakkan *eksklusifitasnya.* AbdurrahmanWahid menyadari sepenuhnya betapa sulitnya untuk memadukan antara demokrasi dan agama dalam konteks toleransi antar umat beragama, agama sebagaimana dimengerti Abdurrahman Wahid senantiasa bertitik tolak dari pandangan normatif yang diajarkan kitab sucinya. Ini berarti hanya ada satu kebenaran yang dapat diterima oleh sebuah agama, yaitu kebenaran ajarannya sendiri. Sementara demokrasi justru membuka peluang yang seluas-luasnya bagi terciptannya perubahan nilai oleh masyarakat, yang demikian justru bisa mengancam nilai-nilai abadi yang terkandung dalam agama.

Salah satu sebab yang menghambat kiprah demokratisasi itu sendiri yaitu di kalangan lembaga dan kelompok keagamaan mengenai perbedaan hakikat nilai-nilai dasar yang dianut keduanya. Sebuah agama senantiasa bertitik tolak dari pandangan normatif yang diajarkan oleh Kitab suci-nya, ini berarti hanya ada satu jenis kebenaran yang dapat diterima sebuah agama, yaitu kebenaran ajarannya sendiri. Sedangkan demokrasi sebaliknya dari ajaran agama, justru membuka peluang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluas-luasnya bagi perubahan nilai oleh masyarakat dan dengan demikian justru dapat mengancam nilai-nilai abadi yang terkandung dalam agama.[43]

Disini terjadi tarik menarik antara demokrasi sebagai suatu keinginan bersama dan mempanyai nilai-nilai yang bersifat universal dengan agama yang berfungsi sebagai *way of life*. Sebagai solusi di mana agama tetap berfungsi sebagaimana mestinya, tidak kehilanggan jati dirinya, namun tetap bisa menghargai bahkan memberi sumbangan bagi terciptannya proses demokratisasi, menurut Abdurrahman Wahid diperlukan adanya upaya untuk melakukan transformasi pada tingkatan internal masing-masing agama.

Jadi Hubungan Islam dan demokrasi, dengan demikian lebih bersifat substantif daripada simbolis. kebangkitan Islam dalam konteks ini harus dipersepsikan sebagai upaya atau kebangkitan untuk menegakkan masyarakat baru yang lebih adil, demokratis dan berkedaulatan hukum serta santun terhadap pluralitas. Esensi kebangkitan adalah upaya pencapaian cita-cita Islam yang sebenarnya yaitu keadilan dan kemakmuran serta kesamaan di antara sesama manusia. Cita ideal Islam adalah terbentuknya suatu masyarakat egalitarian, yang di dalamnya ada kebebasan dan tanggung jawab public dalam kerangka mekanisme *syura* dan prinsip persamaan yang menjunjung tinggi toleransi.

---

[43] Abdurrahman Wahid. *Mengenai Hubungan Agama Dan Negara*. (Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdurrahman Wahid menyadari bahwa untuk melakukan fungsi pembebasan, agama akan mengalami benturan-benturan yang cukup pelik. Selain karena persoalan "*kebenaran mutlak*" yang ada pada masing-masing agama , yang memprihatinkan pada tingkatan internal terjadi "*pendangkalan agama*".

2. Sebuah Proses Demokrasi

Abdurrahman Wahid adalah salah satu pemikir negeri ini yang menerima system demokrasi, meskipun dalam prakteknya bagi Abdurrahman wahid, nilai-nilai demokrasi harus tunduk pada nilai-nilai lokalitas yang dimiliki bangsa, bukan sekedar mengekor atau meniru praktek demokrasi secara utuh yang berkembang di barat atau timur. Artinya, mengambil prakek demokrasi yang positif dari barat atau mungkin dari timur sembari bangsa ini meneguhkan keberadannya sebagai bangsa yang memiliki dan masih memegang religiusitas dan lokalitas sehingga demokrasi di negeri ini harus dikembangkan tanpa mengerus keaslian bangsa.[44] Ini merupakan bagian dari sikap moderat Abdurrahman Wahid dalam memaknai isu menegani demokrasi. dia tidak menolak mentah-mentah konsep demokrasi tersebut, akan tetapi dia juga tidak menerima begitu saja konsep demokrasi.

Dalam tulisannya "*demokrasi harus duperjuangkan*" Abdurrahman Wahid menekankan pentingnya moralitas perjuangan yang berpihak pada rakyat bawah. Seperti halnya kemerdekaan, demokrasi dalam artian yang sebenarnya terlepas dari

[44] Wasid. *Gus Dur* ..., 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

predikat apapun yang dilekaktkan padannya, tidak akan datang begitu saja dengan sendirinya. Ia harus dicapai dengan perjuangan.[45]

Dalam sebuah tulisannya *"Islam pluralisme dan demokratisasi"*, Abdurrahman Wahid mengambarkan adanya dua pandangan utama strategi perjuangan umat Islam. *Pertama,* mereka yang berpendapat bahwa Islam seharusnya tidak menampilkan diri dalam konteks yang esklusif. Paradigma yang menjadi acuan strategi kelompok ini adalah "berangkat dari agama untuk memecahkan masalah-masalah bangsa", dalam hal ini Islam tidak menampilkan keislmannya. *Kedua,* pandangan yang mengginginkan diwujudkannya ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pranata Negara. Paradigmanya berangkat dengan agama untuk memecahkan masalah bangsa. Dalam konteks inilah tampaknya Abdurrahman Wahid, sebagai penganut pendekatan pertama seperti di atas, memberikan perhatian terhadap pentingnya demokratisasi yang perlu ikut diperankan oleh umat Islam. Dalam proses ini semua unsur dalam masyarakat harus dilibatkan tanpa mengenal golongan manapun.

Yang tak kalah pentingnya, masyarakat dituntut juga untuk siap berdemokrasi. Jadi bukan hanya sebatas institusi saja seperti lembaga legislatif dan partai politik. Mengingat penyebab ketidak-demokratisan, bukan saja pemerintah,

---

[45] Abdul Ghofur. *Demokratisasi* ..., 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi masyarakat juga menjadi penyebabnya. Pemerintah menurutnya tidak mungkin bersikap demokratis kalau tidak diberi ruang oleh rakyat.

Jadi demokrasi juga mecakup kehidupan keseharian masyarakat. Proses demokrasi harus tercermin dalam interaksi antar kelompok dan golongan dalam masyarakat. Pola kehidupan keluarga, bahkan hubungan antar individu harus didasarkan pada sistem demokrasi. Artinya demokratisasi harus dimulai dari ruang terkecil dalam interaksi masyarakat. Pada tataran individu, struktur relasi kekuasaan juga menentukan esensi dan kualitas demokrasi level di atasnya, yaitu masyarakat dan negara. Proses demokrasi akan berlangsung lebih baik jika setiap individu memiliki pengetahuan yang memadai tentang nilai-nilai demokrasi. Kedua tataran inilah yang menentukan karakteristik demokrasi modern, yang oleh Huntington disebut sebagai demokrasi yang mendasarkan pada negara-kebangsaan.

Demokrasi adalah sebagai salah satu proses, atau bisa dikatakan proses yang rumit, artinya demokrasi tidak dipandang sebagai suatu system yang pernah selesai dan sempurna. Demokrasi sebagai proses mengandung makna bahwa kadar pelaksanaan konkrit dari prinsip demokrasi itulah yang jadi ukuran penting. Proses tersebut tidak hanya menyangkut aspek kelembagaan saja, melainkan menyangkut aspek-aspek lain dalam kehidupan. Semua itu harus ada ada jika ingin demokrasi benar-benar berjalan, aspek itu adalah tradisi atau proses. Dengan memahami bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokrasi adalah proses, maka usaha keras tidak pilihan harus diciptakan secara serius oleh semua kalangan.

Dari pemahaman demokrasi ini, setidaknya ada tiga hal pokok yang menjadi *concern* pemikiran demokrasi dari Abdurrahman Wahid, *pertama,* pengembanggan wawasan kebangsaan dengan entry point menolak segala bentuk eksklusifme dan sektarianisme. *Kedua,* kegigihan dalam mengupayakan civil society yang berdaya. Dan *ketiga*, penghargaan terhadap pluralisme atau kemajemukan masyarakat Indonesia. Sikap pertama ditunjukkan lewat penolakannya terhadap berbagai ragam bentuk organisasi yang berupaya melakukan formalisasi agama yang cenderung bersifat eksklusif dengan mengedepankan sektarianisme.

Demokrasi bukanlah barang yang sudah jadi, dan masyarakat tinggal menerima bentuk konkretnya. Bagi Abdurrahman Wahid, demokrasi adalah sebuah perjuangan, tanpa perjuangan penegakan demokrasi akan selalu berakhir tragis dan bisa menjadi berakhir dengan tirani. Sebagai sebuah perjuangan, maka demokrasi bermakna dalam proses bukan dalam bentuk produk semata.

Penciptaan demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan Negara merupakan visi politik kenegaraan Abdurrahman Wahid. Ukuran tegaknya demokrasi dalam visi politiknya tidaklah ditujukan pada persoalan kekuasaan politik semata, melainkan pada nilai-nilai kebenaran. Itulah sebabnya, Abdurrahman Wahid dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu tulisannya berjudul *demokrasi dalam perspektif kita* mengeluarkan kritik terhadap demokrasi di Indonesia yang lebih banyak menggunakan terminologi *demokrasi* hanya untuk menutup-nutupi perilaku yang tidak demokratis.[46]

Di negeri kita demokrasi belum lagi tegak dengan kokoh masih berupa hiasan dari luar bersifat kosmetik daripada sikap yang melandasi pengaturan hidup yang sesungguhnya. Karenannya, dari sekarang sebenarnya telah ditunut dari kita kesediaan bersama untuk memperjuangkan kebebasan dan menyempurnakan demokrasi yang hidup di negeri kita. Perjuangan itu haruslah dimulai kesediaan menumbuhkan morallitas baru dalam kehidupan bangsa, yaitu moralitas yang merasa terlibat dengan penderitaan rakyat di bawah.[47]

Tradisi penciptaan demokrasi haruslah bersandarkan pada nilai kebenaran bukan terletak pada jumlahnya. Kualitas demokrasi tidak terletak pada seberapa besar orang atau masyarakat mengikutinya, melainkan pada dimensi kebenaran di dalamnya. Penegakan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari semangat untuk mengedepankan nilai kebenaran di dalamnya. Prinsip ini menjadi semacam moralitas yang harus dijalankan oleh pejuang-pejuang demokrasi.semangat mengedepankan nilai kebenaran tidaklah harus bersandarkan pada ajaran

---

[46] Listiono Santoso. *Teologi* ..., 210.
[47] Abdurrahman Wahid. *Tuhan tidak perlu dibela*. (Yogyakarta, LKiS, 1999), 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan tertentu, melainkan lebih pada aspek kebenaran itu sendiri secara obyektif.

Kondisi yang harus ada bagi proses demokratisasi yang memungkinkan tegaknya HAM (Hak asasi manusia) dan pluralisme menurut Abdurrahman Wahid adalah sebuah Negara hukum yang menegakkan supremasi hukum dan dipenuhinnya persyaratan *the rule of law*. Hal ini untuk menciptakan suatu Negara ideal yang bebas dari para penguasa dan para pemimpin yang rakus dan jahat. Supremasi hukum ini bisa tegak jika ada tiga unsur yang berfungsi secara efektif, yaitu konstitusi, peradilan bebas dan hak uji peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketiga unsur di atas, maka kedaulatan hukum, yang berarti kedaulatan rakyat, akan berfungsi efektif sesuai dengan cita-cita dan kepentingan actual Negara bersangkutan. Adanya hukum sendiri secara hakiki bertujuan untuk menjamin keadilan, kebebasan, dan kesetiakawanan.[48]

Namun meskipun demokrasi telah menjadi hal terbaik dan paling rasional, Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa demokrasi tidaklah pernah sempurna dan memuaskan. Penghayatan bahwa demokrasi adalah suatu proses, yaitu proses yang ajeg dan tak henti-hentinya. Demokrasi bisa diklaim sebagai sebuah system politik yang sempurna saat ini. tetapi kesempurnaan demokrasi mengandung makna dinamis dan dialektis.

---

[48] franz magnis suseno. *Etika politik*. (Jakarta; gramedia pustaka utama, 1994), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian demokrasi akan senantiasa diperbarui sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan disinilah sesungguhnya letak keungggulan system demokrasi. Mantan perdana menteri (PM) Inggris, Sir Winston Spencer Churchill pernah menyatakan demokrasi sebagai system politik yang sangat lemah, tetapi paling baik dibandingkan dengan sistem-sistem politik yang lain. Ia membuktikan hal itu dengan memimpin bangsa Inggris dalam perang melawan Jerman yang dikenal dengan pertempuran "*Beatle of Britain*".[49]

Dengan nada mengingatkan, Abdurrahman Wahid mengatakan, apabila kita masih menghendaki terjadinya proses demokratisasi, kita tidak boleh dibuat tak berdaya sama sekali menghadapi kekuatan luar yang memang dahsyat. Caranya kita harus membuat semacam "*garis*" kesanggupan untuk bermartabat yang penuh tekad untuk menyatakan bahwa sekalipun belum mampu untuk secara positif memberi sumbangan bagi tegaknya demokrasi, pantang untuk terlibat atau melibtakan diri dalam setiap sikap atau perbuatan yang *membunuh* atau menghambat demokrasi.

3. Liberalisme di mata Abdurrahman Wahid

Gagasan Islam sebagai etika social dalam kehidupan Negara bangsa dan pribumisasi Islam yang ditawarkan Abdurrahman Wahid sebenarnya membuka peluang yang cukup besar baginya untuk masuk dalam diskursus demokrasi

---

[49] Abdurrahman Wahid. *Kumpulan Kolom Dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lenggser*. (Yogyakarta: *LKIS*, 2002), 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontemporer yang bercorak liberal, bahkan relatif sekuler. Prinsip-prinsip universal hak-hak asasi manusia, prinsip kedaulatan rakyat, persamaan di depan hukum atau undang-undang, kebebasan individu yang meliputi kebebasan berfikir, berorganisasi dan beragama, dan aspek-aspek lain yang ada dalam system demokrasi liberal diterima secara terbuka dan positif oleh Abdurrahman Wahid.[50]

Liberalisme oleh Abdurrahman Wahid dimengerti sebagai filsafat hidup yang mementingkan hak-hak dasar manusia, yang menyakini perlunnya secara mutlak ditegakkannya kedaulatan hukum, yang menghendaki perlakuan yang sama di muka hukum atas semua warga Negara, tanpa memandang asal-usul etnis, budaya dan agama.[51]

Secara terbuka pula Abdurrahman Wahid menunjukkan sikap apresiatifnya terhadap paham liberalisme yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang bebas dan berdaulat. Liberalisme bahkan melindungi mereka yang berpendapat dari kelompok mayoritas, dengan ungkapan lain lineralisme memiliki nilai-nilai yang mendukung peradaban tinggi. Namun Abdurrahman Wahid juga menolak secara tegas masyarakat tanpa aturan atau norma, karena hal ini bukan saja sebuah kemustahilan, tetapi juga menimbulkan anarki dan situasi yang penuh dengan kerusakan. Memang, sepintas Abdurrahman Wahid apresiatif terhadap liberalisme,

---

[50] Umaruddin Masdar. *Membaca* ..., 143.
[51] Ma'mun Murod Al-Brebesy. *Menyingkapi* ..., 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi liberalisme yang dimaksudnya berbeda dengan liberalisme yang digagas Lock.

Demokrasi liberal yang diandaikan Abdurrahman Wahid, berada diantara demokrasi liberatif Locke dengan demokrasi deliberatif Habermas. Di satu sisi, Abdurrahman Wahid mengandaikan adanya proses dialogis (Habermas: komunikatif) dalam demokrasi. Tetapi di lain sisi, ia yakin bahwa kebebasan individu (liberalisme) sangat penting. akan tetapi kebebasan itu sendiri ada batasannya, kebebasan individual yang terlampau bebas akan mengakibatkan kekacauan, dan kebebasan seperti itulah yang akan melahirkan anarki dan dari anarkilah tirani itu tercipta jika tidak dipoles dengan etika. Akibat yang lain ialah runtuhnya seluruh norma hidup dan standar moralitas, Adalah kebebasan yang tak beradab yang oleh Plato disebut kebebasan *ekstrim.*[52]

Betapa besar bahaya yang terkandung di dalam kebebasan individual yang tak beradab yang begitu mudah menjerumuskan manusia ke dalam belenggu perbudakan tirani yang tak mengenal belas kasihan. Dan kebebasan seperti itulah yang ditolak dalam Negara ideal Plato. jadi kebebasan seperti apa yang diterima oleh Plato? yaitu kebebasan yang diterima dalam Negara ideal ialah kebebasan untuk tidak merasa terganggu baik yang disebabkan oleh ulah sesama warga maupun oleh ulah para penguasa, kebebasan untuk menambah dan memperbanyak harta milik, untuk mengembangkan diri sedemikian rupa guna mencapai keutamaan

[52] DR.J.H.Rapar,Th.D.,Ph.D. *Filsafat Politik Plato.* (Jakarta; rajawali Pers, 1988), 102-103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kebajikan pokok agar setiap warga Negara benar-benar menjadi warga Negara ideal dalam Negara idaman itu.[53]

Adanya Hukum untuk mencegah si kuat (penguasa) dari mencampuri dan mendominasi kehidupan kita, hukum sendiri secara hakiki melindungi kebebasan mereka yang ada di bawah, Akan tetapi hukum tetap menjamin kebebasan hakiki manusia. jadi hukum secara hakiki harus melindungi kebebasan para anggota masyarakat. Inti universal dari nilai kebebasan itu ialah hak setiap orang dan kelompok untuk mengururs diri sendiri lepas dari paksaan siapapun itu.[54] Dan juga dalam batasan-batasan norma agama dan norma kesusilaan.

Demokrasi menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi bukan saja karena demokrasi sangat memungkinkan terbentuknya suatu pola interaksi dan relasi politik yang equal, tidak eksploitatif, tetapi demokrasi sangat mendukung tegaknya pluralisme bangsa. Minat Abdurrahman Wahid yang sangat tinggi terhadap demokrasi didorong oleh citi-cita untuk menegakkan pluralisme itu. Dalam dunia modern, demokrasi lah yang dapat mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa. Demokrasi menjadi sedemikian penting dalam sebuah Negara yang pluralistic karena ternyata perikehidupan kebangsaan yang utuh hanya bisa tercapai dan tumbuh dalam suasana demokratis.

---

[53] *Ibid.*, 106.
[54] Franz Magnis Suseno. *Etika* ..., 116-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi Abdurrahman Wahid, tegaknya pluralisme masyarakat bukan hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan secara damai, tetapi lebih dari itu yakni adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan kelompok yang lain memberi dan menerima. Karena salah satu substansi demokrasi adalah kebebasan untuk saling memberi dan menerima.

Perjuangan menegakkan HAM, demokrasi dan kedaulatan hukum, dalam pemikiran Abdurrahman Wahid merupakan perjuangan kemanusiaan universal. Walaupun dalam praktek peneggakan hukum saat ini, dihadapkan pada sebuah kenyataan pahit. Kedaulatan hukum hanya dapat diteggakan sebagian saja, terdapat kekuatan hukum yang tidak akan dapat dikenakan kedaulatan hukum itukarena kuatnya mereka.[55]

Kesamaan terutama dalam arti kesamaan kedudukan di hadapan hukum itu berlaku umum. Perbedaan antara si kuat dan si lemah yang dalam kenyataan hidup sehari-hari merupakan salah satu kerangka acuan terpenting bagi kita dalam menjajagi setiap situasi yang kita masuki oleh adanya hukum dibuat tidak operatif dalam ururusan-urusan paling penting.

Pemikiran demokrasi Abdurrahman Wahid di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa ia telah menerima konsep demokrasi liberal atau parlementer dan secara tegas menolak pemikiran atau paham "kedaulatan Tuhan" atau pemikiran

[55] Abdurrahman Wahid. *Kumpulan* ..., 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berusaha mengawinkan kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat, seperti yang dirumuskan oleh Dhiya' ad-Din Rais.

Gagasan pribumisasi Islam dan implementasi Islam sebagai etika social dalam kehidupan Negara pluralistik jelas mengandung implikasi bahwa dalam konteks demokrasi Islam tidak ditempatkan sebagai ideologi alternatif. Kontribusi Islam terhadap demokrasi bisa dicapai bila dari ajaran Islam ditarik sejumlah prinsip universalnya seperti persamaan, keadillan, musyawarah, kebebasan dan *rule of law.*

Salah satu ajaran yang dengan baik menampilkan universalisme Islam adalah lima buah jaminan dasar baik kepada warga perorangan maupun sebagai kelompok. Jaminan itu meliputi: 1) keselamatan fisik warga Negara dari tindakan badani di luar ketentuan hukum, 2) keselamatan keyakinan agama masing-masing, 3) keselamatan keluarga dan keturunan,4) keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum, dan 5) keselamatan profesi.

Dari paparan di atas jelas terlihat bahwa pemikiran demokrasi Abdurrahman Wahid merupakan telaah yang panjang atas khasanah pemikiran radisional sehingga terbentuk pola pemikiran yang inklusif dan sekaligus liberal. Corak pemikiran Abdurrahman Wahid yang mempunyai kemiripan dengan Muhammad Abduh beranggapan bahwa kekuasanaan politik merupakan urusan kehidupan manusia yang bersifat bebas dari keharusan legitimasi agama. Demokrasi sebagai sub-diskursus kekuasaan juga bebas dari keharusan legitimasi agama atasnya karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokrasi menyangkut urusan masyarakat atau warga Negara untuk menentukkan nasibnya sendiri

Salah satu prinsip mengenai kebebasan individu dalam konteks pemilihan penguasa, sebaiknya kekuasaan mengatur Negara diserahkan kepada kelompok yang memiliki kualitas moral, pengetahuan, dan kekuatan fisik yang terbaik. Tidak diserahkan ke sembarang orang-orang yang awam tentang kekuasaan. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia di mana setiap orang diberi kebebasan yang berlebihan dalam pencalonan si penguasa. Yang terjadi banyak orang-orang yang tidak mempunyai kualitas untuk memimpin akhirnya terpilih menjadi pemimpin. Hal ini mengakibatkan kepemimpinan si penguasa yang tidak bisa mensejahterakan rakyatnya.

E. Demokrasi Negara dan Masyarakat Ideal

1. Penegakan nilai-nilai HAM, keadilan, egaliter (persamaan), dan Kebebasan

Kenyataan menunjukkan bahwa demokrasi selalu menjadi perhatian kemanusiaan seluruh dunia saat ini. ia adalah pilar peradaban, tidak ada satu kelompok atau bangsa pun yang menolaknya sejauh demokrasi diartikan sebagai usaha mewujudkan kedaulatan rakyat secara penuh. Termasuk di Indonesia gagasan demokrasi dan demorkatisasi terus menggulir setelah runtuhnya rezim Orde baru yang dipimpin Soeharto. Wacana demokrasi yang digulirkan ini yang hingga saat ini menjadi perdebatan public, mempunyai tujuan untuk menemukan identitas sejati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokrasi yang belum dimiliki oleh system demokrasi Indonesia. Terciptannya keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu, tanpa kekerasan merupakan identitas demokrasi yang perlu digali. Jika tidak demokrasi tidak akan pernah menjadi landasan filosofi hukum Negara yang mapan dan mampu menciptakan kemaslahatan bagi wargannya.

Abdurrahman Wahid mengartikan demokrasi sebagai kondisi dimana kebebasan berpendapat, ke-*nyeleneh*-an benar-benar dijamin undang-undang, sebab menurutnya "*nyeleneh*" merupakan salah satu esensi dari demokrasi. Selain itu, demokrasi juga mensyaratkan adanya, *pertama,* rasa tanggung jawab pada kepentinggan bersama, *kedua,* kemampuan menilik masa depan. Dan ini semua menurut Abdurrahman Wahid membutuhkan adanya kerelaan dan keingginan untuk melakukkan sesuatu tanpa harus diberi imbalan. Nah kerelaan inilah sebenarnya hakekat dari demokrasi. Jadi demokrasi adalah sesuatu yang dilakukan dengan rela.[56]

Kemudian dalam kutipan wawancara dengan majalah Tempo Abdurrahmamn Wahid mengatakan esensi dari demokrasi adalah kontroversi. '*Kontroversi adalah demokrasi, kalau anda melarang adanya kontroversi, anda calon diktator bukan Pancasila. Kenapa takut adanya kontroversi sedangkan Nabi saya mengijinkan kontroversi. Apa mau lebih tnggi dari nabi? Masyarakat*

[56] *Ibid*, Hal 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharapkan adanya pertukaran pandangan yang sehat dan jujur'.[57] Kontroversi merupakan hal yang pasti terjadi di tengah penerapan system demokrasi, dari kontroversi tersebut diharapkan dapat mencari kesepahaman dari perbedaan tersebut. Tidak fanatik membela golongannya dan merasa paling benar.

Sebenarnya jika kita jeli dan lebih teliti, pemikiran-pemikiran gusdur itu "biasa-biasa" saja, pemikiran Abdurrahman Wahid bukan merupakan pemikiran yang "*nganeh-anehi*". Pemikiran-pemikirannya sebenarnya merupakan sebuah pencernaan yang panjang sebagai hasil dari hobinya yang bisa dikatakan gila baca. Buku apa saja hampir dia baca, tak peduli pemikiran-pemikiran liar macam Das Kapital-nya Karl Max, yang mungkin bagi sebagian orang, buku tersebut sangat berbahaya dan haram dibaca umat Islam karena lahir dari seorang tokoh komunis yang cenderung atheis. Ia memang terlihat seperti diktator, namun sebenarnya ia tengah "membebaskan" dirinya dan orang lain, dan dia tidak terlalu mempedulikan kata orang lain. Ia seolah "tidak bisa dikritik" oleh orang lain, padahal sebenarnya ia telah berhasil menciptakan kritik yang ditujukan pada dirinya, terutama oleh orang-orang yang tidak begitu mengenalnya. Sampai disini ia telah berhasil "memancing" orang untuk bebas berpendapat dan berfikir.

Kebebasan berpendapat dan berfikir, menjunjung tinggi hak azasi manusia yang Dimana dia menghormati dan melindungi kaum minoritas, merupakan sebagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam konsep demokrasi. Abdurrahman

[57] Ahmad Amir Aziz. Neo-Modernisme Islam Di Indonesia. (Jakarta; Rineka Cipta, 1999), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahid secara tidak langsung telah memperkenalkan konsep demokrasi tersebut dengan caranya sendiri yang melawan arus. Dia berfikir secara berbeda dengan kebanyakaan orang lain.

Itulah Abdurrahman Wahid, dengan caraanya sendiri ia memperkenalkan sebuah nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai yang sesuai dengan agama yang dianutnya yakni Islam. walaupun dilain sisi kekuranggan pemikiran Abdurrahman Wahid menurut penulis yang tidak terlalu menjelaskan mengenai bagaimana membentuk sebuah masyarakatd ideal (dicita-citakan) yang akhirnya prinsip-prinsip demokrasi itu terealisasi dan dapat membentuk Negara ideal yang pluralistik.

Hal lain yang menjadi problema yakni mengenai kebebasan, di saat pemerintahan mendapat kebebasan, yang berarti kesempatan untuk melaksanakan dan menyelengarakan kekuasaan yang dimilikinya. Banyak yang menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Sebaliknya apabila rakyat yang medapatkan kebebasan yang berlebihan, yang berarti adanya ruang gerak yang lebih leluasa untuk berbicara menyatakan pendapat dan sikap serta berbuat sesuatu maka yang akan terjadi kekacauan dan dekadensi moral. Semakin besar kebebasan yang diperoleh oleh rakyat berarti semakin kecil kebebasan yang diperoleh penguasa atau pemerintah untuk menjalankan kekuasaanya, semakin kecil kebebasan yang diperoleh oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat berarti semakin besar kebebasan yang diperoleh pemerintah untuk menyelenggarakan kekuasaanya.[58]

Abdurrahman Wahid berusaha mengedepankan nilai-nilai keadilan social di tengah masyarakat plural. Prinsip umum dalam masyarakat biasanya mengatakan bahwa tidak ada agama di dunia ini yang mengingginkan bersemayamnya ketidakadilan. Ketidakadilan merupakan bentuk dari lepasnya prinsip egalitarianism yang menjadi titik tolak penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Perjuangan terhadap ketidakadilan dengan demikian merupakan konkretisasi dari ajaran agama, tanpa harus menyebut hal tersebut sebagai bagian dari agama. Keadilan dan kemanusiaan di tengah pluralitas masyarakat adalah jaminan ditegakkanya suatu komunitas masyarakat yang demokratis. Keadilan dan kemanusiaan menjadi spiritualitas tidak hanya bagi individu, tetapi juga masyarakat.[59] Abdurrahman Wahid juga berpendapat bahwa penegakan keadilan merupakan upaya untuk mengembangkan demokrasi.

keadilan seperti apa dan keadilan menurut siapa? Apakah keadilan yang dimaksudkan oleh penguasa. dimana mereka ciptakan hukum dan membuat undang-undang untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, dan itu dikemukakan kepada rakyat sebagai 'adil' dan siapa yang melangarnya dianggap bersalah dan dihukum. Di mana keadilan seperti ini merupakan kepentingan orang yang lebih kuat dan

---

[58] DR.J.H. Rapar, Th.D, Ph.D. *Filsafat* ..., 99.
[59] *Ibid.*, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya berlaku bagai para penguasa atau pemerintah Dan tidak berlaku bagi rakyat biasa.

Plato sendiri mengatakan bahwa setiap Negara selalu terdapat prinsip yang sama tentang keadilan yang merupakan kepentingan pemerintah, maka satu-satunya kesimpulan yang masuk akal adalah bahwa hanya ada satu prinsip tentang keadilan yang merupakan kepentingan dari orang-orang yang lebih kuat.[60]

Seperti halnya yang terjadi di Indonesia saat ini, dalam keadilan dan persamaan di depan hukum, dimana hukum hanya dapat di tegakkan hanya kepada orang-orang yang miskin atau orang-orang yang tidak mempunyai kekuasaan, akan tetapi hukum tidak berlaku bagi yang kuat atau yang kaya. Prinsip-prinsip demokrasi yang salah satunya menjunjung rasa keadilan masih belum terwujud, hal ini disebabkan karena banyaknya penjabat yang korup. Hal ini dapat membuktikan bahwa nilai-nilai demokrasi masih belum terealisasi dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Demokrasi masih hanya sebatas dalam wacana saja.

Kehidupan itu akan baik tercapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. keadilan bukanlah secara individualistik sekedar keadaan di mana hak semua anggota masyarakat terjamin. Melainkan keadilan dipahami sebagai tatanan seluruh masyarakat yang selaras dan seimbang. Masyarakat yang adil bagi plato adalah masyarakat yang dipersatukan oleh tatanan yang harmonis, dimana masing-

[60] Plato. *Republik*. (Yogyakarta; Bentang Budaya, 2002), 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing anggota memperoleh kedudukan sesuai dengan kodrat dan tingkat pendidikan mereka.[61]

Dalam pembicaraan mengenai Negara, tema tentang kekuasaan selalu menarik untuk dikaji. Tema kekuasaan telah menjadi *mainstream* dalam perdebatan para filosof ketika menjelaskan persoalan-persoalan berkaitan dengan konsep Negara. Kekuasaan menjadi perhatian utama para filosof. Kekuasaan yang mutalk sendiri diperlukan oleh Negara, kekuasaan ini diperlukan untuk mendidik warganya dengan nilai-nilai moral yang rasional. Akan tetapi tidak menuutup kebebasan individu untuk melakukan kewajibannya. Bagi Plato kekuasaan yang besar pada Negara merupakan hal sepatutnya, individu akan menjadi liar dan tidak dapat dikendalikan bila Negara tidak memiliki kekuasaan yang besar.

Dalam kaedah fikih yang sring kali dikutip Abdurrahman Wahid "*dar'u al mafasidi awla min jalbi al-masalih*" menolak kerusakan lebih baik daripada menarik kebaikan. Artinya dalam pemerintahan demokrasi kekuasaan sejatinya alat yang diperebutkan dengan mekanisme yang ditentukan oleh rakyat. sebagai alat, kekuasaan ditunntut menjadi solusi terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih manusiawi, memiliki kebebasan dan berkeadilan, bukan malah menggunakan kekuasaan utuk mengintimidasi yang lain sebagaimana dilakukan pada rezim otoriter.[62] Perebutan kekuasaan dengan cara tumpahan darah, saling memfitnah

---

[61] Franz Magnis Suseno. *Etika* ..., 187.
[62] Wasid. *Gus Dur* ..., 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta menjadikannya alat untuk korupsi harus dihindarkan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan berlawanan dengan prinsip universal dari gama itu sendiri, misalnya berlawanan dengan perintah Islam untuk senantiasa saling mengasihi dan menolong sesama.

Negara yang baik adalah Negara yang merealisasikan keadilan, artinya yang ditata secara selaras dan seimbang, dan dipimpin dengan berorientasi pada *idea* metafisik kebaikan. Negara semacam itu paling sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat dan dengan demikian paling menunjang kebahagiaan. Apa itu kebaikan? Yaitu sesuatu itu benar atau baik karena bersesuaian dengan alam atau bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Itu merupakan konsep tentang bentuk obyektif kebaikan.[63]

2. Aspek-Aspek Penentu Terealisasinya prinsip demokrasi

Keadaan di Indonesia pada saat ini hampir sama yang terjadi di Athena pada eranya Plato pada waktu itu. System demokrasi yang menyebabkan kekalahan Athena dalam perang melawan Sparta, semakin merosotnya dalam semua bidang, dekadensi moral, dan kursi pemerintahan menjadi rebutan oleh orang-orang yang berambisi akan tetapi tidak memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin. Itu merupakan efek-efek negatif dari penerapan system demokrasi yang masih rancu.

Menurut teori Platonik sendiri beranggapan bahwa sangat bodoh dan tak bermkana untuk menempatkan individu yang *inferior* dalam posisi kepercayaan public sementara dia tidak cakap secara alamiah juga tidak terlatih. Ia juga

[63] Carol C. Gould. *Demokrasi ditinjau kembali.* (Yogyakarta; Tiara Wacana, 1993), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpadangan bahwa tindakan tersebut secara tidak nyaman akan mempengaruhi kesejahteraan orang-orang yang inferior dan mengghilangkannya dari bimbingan dan pikiran superior.[64]

Terasa sekali pada saat ini bahwa tidak ada kepemimpinan nasional maupun kepemimpinan umat Islam yang menonjol, yang sanggup memberikan inspirasi dan sanggup membakar semangat generasi muda. Tidak ada seorangpun pemimpin bangsa yang dapat menjadi gambaran cita (*ideal type*) generasi muda menjadi penyuluh di kala kegelapan dan menjadi petunjuk di tengah badai kehidupan. Seolah-olah kehidupan bangsa dewasa ini tengah dipimpin oleh sejumlah pemimpin dengan kemampuan rata-rata.[65]

Abdurrahman Wahid mengatakan Negara Ideal menurut Islam adalah yang mensejahterakan, menegakkan keadilan, dan kemakmuran rakyatnya. Bukan negara yang berideologikan Islam. Sedangkan Menurut fiqh cita-cita Islam mengenai negara intinya adalah maslahah (bermanfaat) dengan membangun kesejahteraan. Tidak diletakkan dalam konteks ideologi.

Kemudian mengenai Solusi terhadap persoalan tentang sturktur Negara ideal (Negara yang dicti-citakan) yang beradab menurut penulis adalah pembagian warga Negara dalam empat kelas yang dimana masing-masing kelas tersebut memiliki fungsi khususnya sendiri. Kelas pertama yakni pemimpin atau penguasa, yang

---

[64] Henry J. Schmandt. Filsafat Politik. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar), 2002), 73.
[65] Abdurrahman Wahid. *Hubungan* ..., 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan bagian Negara melalui legislasi. Kelas kedua yakni prajurit, mempunyai fungsi menjaga Negara dan menegakkan hukum. kelas yang ketiga yakni kelas produsen yang menyediakan kebutuhan material untuk masyarakat, dan kelas yang terakhir yang merupakan kelas yang paling penitng dari ketiga kelas untuk menciptakan suatu komponen masyarakat yang ideal yakni kelas pembimbing spiritual dalam agama Islam biasa disebut Kiai atau Ustadz atau dalam agama Kristen dikenal dengan Pastur atau juga dalam agama Budha yang dikenal dengan Biksu. Kelas ini mempunyai fungsi memberikan gambaran tentang makna akan kebijaksanaan yang hakiki agar terbentuk manusia yang berbudi luhur. Agar nantinya dalam kehidupan sehari-hari, antar individu baik seagama maupun tidak segama dapat menghargai orang lain yang itu merupakan salah satu dari nilai-nilai demokrasi. Struktur kelas yang diajukan tersebut bukanlah system kasta melainkan system yang setidaknya secara teoritik memberikan mobilitas social. keanggotaan dalam beragam kategori itu ditentukkan oleh kemampuan bukan kekayaan atau kelahiran.

Dari pembagian kelas tersebut mempunyai syarat-syaratnya. Dalam kelas pertama ada beberapa syarat untuk menajadi pemimpin yang ideal, diantaranya yakni pemimpin tersebut harus mempunyai sikap bijaksana, kebijaksanaan itu terkandung dalam pengetahuan tentang yang baik. Bahwa siapapun yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui apa yang baik akan melakukan apa yang benar.[66] kemudian Seorang kepala Negara harus seperti filosof yang memiliki sikap arif dan memiliki nalar aktif, yang bisa menyerap ilham. Mengerti tentang yang 'baik' (kebajikan, ketaatan, keadilan). Seorang kepala Negara juga harus memiliki *personal approach* yang baik agar terasa akrab dengan rakyatnya. Memilih Kepala Negara yang bersifat '*primus interpares*'

Mengapa harus memilih seorang yang berfikir secara filosof yang pantas menjadi pemimpin? Pertama, bahwa kehidupan bernegara itu perlu mengedepankan kualitas moral, yang menjadi pilar penting komunitas. Dan yang pertama-tama harus memperlihatkan kualitas-kualitas moral itu adalah Pemimpin. Kedua, di belakang tuntutan ini tersirat pula makna bahwa para pemimpin haruslah mampu menjadi teladan kebaikan dan kebajikan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ia harus mampu menjadi tiruan moral bagi masyarakat. Kehancuran suatu masyarakat disebabkan karena pemimpinya yang rusak oleh sebab itu seorang pemimpin diharapkan berfikir seperti seorang filosof.

Dalam sejarah Indonesia sendiri, tokoh-tokoh yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin menurut penulis yaitu Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Soekarno yang merupakan sosok yang tegas, adil, dan kejeniusan akalnya yang membawa Indonesia meraih kemerdekaan, tidak hanya jenius tetapi juga cerdik dan cerdas akalnya. dia juga mempunyai daya feeling kebudayaan dan seni yang luar

[66] Bertrand Russell. *Sejarah Filsafat Barat*. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasa. Sedangkan sosok Abdurrahman Wahid yang terkenal dengan pemikiran kontroversialnya, tetapi penuh makna, pemikirannya yang sering melawan arus tetapi penuh kebijaksanaan. Tokoh lintas agama Dan dalam bidang kebudayaan tidak dipungkiri pula keterlibatannya yang cukup berarti.

Kemudian masyarakat kelas kedua dalam masyarakat ideal yakni kelas pembantu atau militer. Tugas dari kelas ini ialah menjaga stabilitas dan keamanan Negara. Menerapkan hukum-hukum yang berlaku. Bagi kelas ini juga memiliki syarat-syarat yang tidak mudah. Dalam kelas ini keperkasaan, ketegasan, dan keadilan haruslah menjadi moralitas jiwa yang paling utama, harus memiliki sikat pemberani, memiliki jiwa kesatria dan juga harus orang-orang yang saleh (bijaksana) tahu mana yang benar-mana yang salah. Sikap saleh ada hanya bila didasarkan pada pengetahuan sejati.

Dengan pengetahuan yang sejati maka dia akan mengetahui tentang kebijaksanaan yang hakiki. Kelas yang ketiga ialah kelas produsen atau penghasil yang merupakan kelas yang paling banyak dan tidak menuntut syarat yang berat, kelas ini diharapkan harus memiliki sifat pengendalian diri yang merupakan menjadi keutamaan bagi semua orang dalam kelas penghasil atau produsen. Adanya sikap pengendalian diri ini mempunyai tujuan agar dalam masyarakat ini tidak mudah berlaku anarkis, hal yang saat ini sering terjadi di Indonesia. Tidak mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain missal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan yang terakhir yang harus menjadi kebajikan pokok dari kempat kealas yakni moralitas jiwa atau keutamaan bagi seluruh kelas dalam Negara ideal ialah keadilan. Hanya keadilan yang memunggkinkan keselarasan dan keseimbangan antara masing-masing kelas dalam Negara itu dapat terpelihara dengan baik. Keadilan dimana kita mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Dan hanya keadilan yang dapat membentuk suatu Negara ideal. Suatu Negara ideal terbentuk jika keadilan dan moralitas teraplikasikan dalam kehidupan kita.

Pembagian ke dalam empat kelas tersebut merupakan salah satu cara untuk membentuk masyarakat ideal, sehingga bila telah terbentuk suatu masyarakat yang ideal akan dapat menjadikan sebuah Negara tersebut menjadi Negara ideal. Masyarakat yang bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan terdapat syarat-syarat dalam setiap kelas. Syarat-syarat tersebut tergantung kelasnya, semakin tinggi kelas tersebut semakin berat syarat yang harus dipenuhi.

Bagaimana dengan di Indonesia, apakah sudah dapat dikatakan ideal ataukah belum? Ada beberapa hal kenapa masyarakat kita saat ini tidak dapat dikatakan ideal untuk saat ini, yaitu;

- kelas paling bawah sendiri masyarakatnya mempunyai mental-mental pengemis, daya kritis tumpul, mental disubsidi.
- Kelas penjaga atau militer; mempunyai mental serba instan, mental KKN, hidup ala Asing, konsurmisme, Inndividualis dan manja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Kelas penguasa; serakah, tidak peduli pada rakyat, tidak mempunyai sifat superior.

Oleh sebab itu dapat dikatakan Negara Indonesia saat ini bias dikatakan masih belum terbentuk sebuah Negara ideal, hal ini dikarenakan kelas-kelas dalam masyarakat Indonesia saat ini masih belum memenuhi syarat dalam kelas-kelas tersebut. Hal ini merupakan tugas kelas terakhir yakni pembimbing spiritual untuk membentuk suatu masyarakat ideal.

Kenapa penegakan demokrasi bagi Abdurrahman Wahid begitu penting dalam kemajuan bangsa ini? Sebab menurut Abdurrahman Wahid sendiri dengan diterapkannya system demokrasi ini Negara ini akan menjadi Negara yang maju dan kuat. Dan salah satu pondasinya dalam membentuk sebuah masyarakat dan Negara ideal agar terealsasinya system demokrasi ini ada hal penting lainnya, yakni pendidikan. Di dalam Negara ideal pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya bagi Indonesia saat ini. mengapa pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting? Hal ini dikarenakan Kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami masa mengkhawatirkan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya penjabat-penjabat yang korup, penegakan hukum yang tidak merata, system demokrasi yang tidak terarah dan menjurus ke anarki, hilangnya nilai-nilai kebijakan, kebaikan, dan keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis melihat kebobrokan masyarakat yang begitu parah terjadi di Indoneia saat ini sangat sulit diperbaiki, solusi dari permasalahan yang menurut penulis efektif untuk menanggulangi kebrobrokan itu yakni melalui pendidikan. Pendidikanlah yang sanggup menyelamatkan manusia dan Negara ini dari kehancuran.

Pendidikan seperti apa dan bagaimana? Pendidikan itu sendiri yang dapat menumbuhkan rasa kebijaksanaan, mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang jahat, atau dalam perumpamaan Plato yaitu tentang "*analogi Gua*".[67] Pendidikan seperti apa yang dapat membentuk sebuah Negara ideal? Pendidikan itu ialah pendidikan agama. Mengapa pendidikan agama? Menurut penulis sendiri untuk menciptakan manusia-manusia yang paham akan arti kebijaksanaan, menjunjung tinggi moralitas, pendidikan agama merupakan pondasi

---

[67] Perumpamaan tentang orang-orang tahanan yang terbelenggu di dalam sebuah gua. Konon di dalam sebuah gua di bawah tanah, ditempatkanlah orang-orang tahanan yang terbelenggu sejak masa kecil mereka leher dan kaki mereka terbelengggu sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat berpindah tempat bahkan kepala mereka pun tidak dapat bergerak sehingga mereka hanya dapat memandang ke depan dinding gua. Mereka duduk membelakangi lubang masuk gua yang terbuka bagi cahaya dari luar untuk menerobos masuk ke dalam gua di waktu siang. Namun sumber cahaya tetap bagi mereka berasal dari api unggun yang terus-menerus menyala yang terletakdi tempat yang agak tinggi, sedikit jauh di belakang mereka, berada di atas lubang masuk gua, diantara api unggun dan para tahanan itu ada jalan yang letaknya lebih rendah dari api unggun, namun lebih tinggi dari tempat para tahanan terbelenggu. Jalanan itu senantiasa dipenuhi oleh orang-orang yang hilir mudik menjunjung berjenis-jenis benda seperti patung manusia, hewan, dan bentuk pohon-pohon yang terbuat dari batu atau kayu dan juga barang lainnya. Karena letak jalan lebih rendah dari letak api unggu, maka bayangan yang terpantul ke tembok di depan para tahanan itu hanyalah bayangan dari berbagai jenis benda yang dijunjung oleh orang-orang yang hilir mudik itu. Dan bayingan itu sajalah yang setiap saat dilihat oleh para tahanan itu selama hiudp mereka, sehingga semakin lama mereka akan semakin percaya bahwa bayangan itulah realitas yang sebenarnya. Gua yang berada di bawah tanah itu tidak lain daripada dunia yang dapat diraba dan dilihat. Gua itu melukiskan dunia inderawi, para tahanan adalah gambaran manusia yang terbelenggu oleh tubuhnya dengan perlengkapan panca idera yang terbatas, sedangkan bayangan-bayangan yang mereka lihat setiap saat itu adalah kenyataan inderawi. Lihat DR. JH. Rapar, Filsafat Politik Plato, (Jakarta; CVRajawali 1991), 55-56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak dari uraian-uraian yang telah penulis paparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa; Penulis berpendapat bahwa Kekurangan Abdurrahman Wahid sendiri dari buku-buku Abdurrahman Wahid yang telah dibaca, secara kritis dalam banyak hal Abdurrahman Wahid masih menyisakan berbagai bentuk penjelasan yang belum tuntas, berbagai tulisan tidak lebih dari sekedar perenungan yang bersifat kasuistik[1].

Pilar-pilar demokrai dalam pandangan Abdurrahman Wahid yakni penegakan nilai-nilai HAM, keadilan, egaliter (persamaan), dan kebebasan individu dalam persoalan berfikir dan berpendapat. Itu merupakan aspek yang terpenting dalam teraplikasikannya prinsip-prinsip demokrasi dan juga penguatan civil society. sedangkan menurut penulis sendiri yakni terbentuknya sebuah Negara ideal, untuk membentuk Negara ideal kita harus menciptakan dulu sebuah tatanan masayrakat ideal, dan masayrakat ideal akan tercipta jika pondasi dalam membentuk masayarakat ideal itu terbangun kokoh. Pondasi itu ialah pendidikan agama yang merupakan pembentuk manusia menjadi manusia yang

[1] Menurut atau berdasar kata hati; kumpulan soal-soal atau kasus yang berkenaan dengan dasar moral; sebab-sebab terjadinya sesuatu; ilmu tentang moral suatu penyakit. Lihat di buku Pius APartanto M. Dahlan Al Barry, *kamus ilmiah popular*., (Surabaya; ARKOLA, 1994) Hal 314

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bijaksana dan berbudi luhur. Tidak hanya sebatas penguatan penegakkan nilai-nilai HAM, egaliter, keadilan, dan kebebasan individu dan penguatan *civil society.*

B. Saran

Dalam kajian ini, penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangannya, baik dalam hal data yang diperoleh, analisa, dan dalam pengolahan dalam penulisan skirpsi ini. hal ini dikarenakan keterbatasan daya pikir penulis dalam mengkaji tokoh fenomenal ini.

Oleh sebab itu penulis mengharapkan pemikir-pemikir saat ini atau calon-calon pemikir-pemikir masa yang akan datang untuk menggembangkan permasalahan ini, permasalahan akan prinsip-prinsip demokrasi yang kan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan intelektualitas manusia. permasalahan yang menurut penulis sangat urgen supaya demokrasi kita terarah sesuai dengan kultur masyarakat kita.

Harapan penulis sendiri agar dapat menggugah para pemikir, calon intelektual masa yang akan datang untuk dapat mengembangkan konsep demokrasi ini tanpa merusak nilai-nilai local keindonesiaan dan religiusitas masyarakat Indonensia. Nilai-nilai local yang saat ini mulai tergerus oleh nilai-nilai budaya barat dimana konsep ini muncul dan berkembang, baik dalam hal pemikiran, gaya hidup dan lain-lainya. Hal ini dikarenakan kesadaran penulis akan keterbatasan intelektual dalam mengkaji permasalahan ini, dan hanya ini yang penulis dapat sumbangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal. *Filsafat Manusia (memahami manusia melalui filsafat)* Bandung, PT Remaja Rosdakarya 2000.

Al-Brebesy, Ma'mun Murod. *Menyingkapi pemikiran politik Gus dur & Amien Rais Tentang negara.* Jakarta, PT Raja Grafindo, 1999.

Arfani, Riza Noer. *Demokrasi Indonesia Kontemporer,* Jakarta, PT Raja Grafido Persada, 1996.

Azhar, Azyumardi. *Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyarakat madani.* (Jakarta; Pranada Media, 2000.

Aziz, M.Ag, Drs. Ahmad Amir. *Neo-Modernisme Islam di Indonesia (gagasan sentral nurcholish madjid dan Abdurrahman wahid).* Jakarta, Rineka Cipta, 1999.

Barton, Greg. *Biografi Gus Dur* Yogyakarta; LKiS. 2002.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif (aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer).* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001.

DR.J.Rapar, Th.D.,ph.d. *Filsafat Politik Plato.* Jakarta, CV Rajawali, 1986.

----------. *Filsafat Politik Plato.* Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996.

Dur, Gus. Diantara keberhasilan dan kenestapaan. Jakarta; Rajawali Pers, 1999.

Ghofur,M.Ag, Abdul. *Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam Di Indonesia.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yogyakarta, Walisongo Press dan Pustaka Pleajar, 2002.

Gould, Carol C. *Demokrasi ditinjau kembali.* Yogyakarta; Tiara Wacana, 1993.

Haris, Syamsuddin. *Demokrasi Di Indonesia Gagasan dan pengalaman.* Jakarta, PT Pustaka LP3ES, 1995.

Juliantara, Dadang. *Meretas Jalan Demokrasi.* Yogyakarta; Kanisius, 1998.

Masdar, Umaruddin. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang demokrasi.* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.

M. Bukhori, Pahrurroji. *Membebaskan Agama dari Negara.* Bantul; Pondok Edukasi, 2003.

Nusantari, Abdurrahman. *Ummat Menggugat Gusdur*. Bekasi: Aliansi pecinta syariat, 2006.

Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, *kamus ilmiah popular*, Surabaya; ARKOLA, 1994

Plato. *Republik.* Yogyakarta; Bentang Budaya, 2002.

Rahim, Abd.. *Gus Dur dalam sorotan cendekiawan Muhammadiyah.* Bandung; Mizan,

Russell, Bertrand. *Sejarah Filsafat Barat.* Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002.

Santoso, Listiono. *Teologi Politik Gus Dur.* Yogyakarta, AR-RUZZ, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Schmandt, Henry J.. Filsafat Politik. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002.

Sudarto, Drs. *Metodologi penelitian filsafat*. Jakarta, PT Raja Grafingo Persada, 1997.

----------. Neo-Modernisme Islam Di Indonesia. Jakarta; Rineka Cipta, 1999.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Tobroni dan Arifin, Syamsul. *Islam Pluralisme Budaya dan politik; reflektif teologi Dalam keberagaman dan pendidikan*. Yogyakarta; Sipres, cet I.

Wahid, Abdurrahman. *Islam, Negara dan Demokrasi (Himpunan percikan perenungan Gus dur)*.Jakarta, Erlangga, 1999.

----------. *Mengenai Hubungan Agama Dan Negara*. Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999.

----------. *Kumpulan Kolom Dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lenggser*. Yogyakarta: *LKIS*, 2002.

----------. *Membangun Demokrasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

Wahid, Marzuki. *BEYOND THE SYMBOLS "Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur"*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000.

Wasid. *Gus Dur Sang Guru Bangsa "pergolakan Islam, kemanusiaan dan kebangsaan"*. Yogyakarta; Interpena, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Referensi Internet

http://halilintarblog.blogspot.com/2008/12/empat-masalah-demokratisasi-di.html.

http://zanikhan.multiply.com/journal

http://www.averroes.or.id/book-(review/perkembangan-pemikiran-dan-praktik-demokrasi-dari

era-klasik-sampai-kontemporer.html.

http://adedidik.blogspot.com/2008/06/sejarah-perkembangan-demokrasi.html.

http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/

http://bebekberanak.blogspot.com/2009/02/perkembangan-demokrasi-di-indonesia.html

http://sriyandi.wordpress.com/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id